

# LAPORAN STUDI



## “Bertahan Untuk Penyelamatan Akar Kehidupan”

(Potret Krisis Sosial-Ekologis dan Ragam Inisiatif Resiliensi  
Di Kabupaten Bulungan – Kalimantan Utara)<sup>1</sup>

## Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) 2017

---

<sup>1</sup> Tim Peneliti/ Penulis Laporan: Wahyu A. Perdana dan Eko Cahyono. Tim Studi Lokal: Budi Santoso, Yosran Efendi, Syaifuddin

*“Jika persoalan masuknya perkebunan sawit ini terus berlanjut, berikut dampak-dampak sosial, ekonomi dan lingkungan, saya kuatir yang hilang bukan hanya tanah dan sumber ekonomi kami, tapi juga akar kehidupan kami, sekarang dan akan datang...”*

**(Pak Lawai, Tokoh Adat Long Beluah)**

## **Pengantar**

Kalimantan Utara provinsi termuda di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak Malaysia. Resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012.

Provinsi Kalimantan utara beribukota di Tanjung Selor, yang berada di kab. Bulungan. Nama Bulungan berasal dari sebuah Kesultanan yang pernah ada di daerah tersebut yaitu Kesultanan Bulungan yang berkedudukan di Tanjung Palas.

Sebagai ibu kota, sejak dahulu Bulungan telah menjadi sentral dari perdagangan yang melintasi kalimantan. ini disebabkan wilayah Kesultanan Bulungan terletak pada jalur perdagangan internasional pantai timur kalimantan. Pada masa itu aktivitas perdagangan ramai terjadi disekitar pantai timur di mana para pedagang dari Singapura, Bwansa (Sulu), Magindanou, Bulungan dan Berau singgah kebandar Samarinda merupakan bandar Resmi kerajaan Kutai yang juga menghubungkan Makasar otomatis Bulungan masuk dalam jalur pelayaran internasional pada masa itu. Bandar-Bandar ini menjadi wilayah berkumpulnya pusat perdagangan setelah jatuhnya Malaka ketangan Portugis, Sehingga jual beli hasil bumi yang dikumpulkan diwilayah hulu sungai seperti sarang burung, lilin, rotan dan lain sebagainya juga diperdagangkan di bandar dagang milik kesultanan bulungan ini, yang saat ini menjadi wilayah Tanjung Selor, ibukota provinsi Kalimantan Utara.

Menurut laporan yang dibuat oleh J. Zweger sekitar tahun 1853 misalnya, mencatat aktivitas dagang yang berkembang pesat saat itu, Munculnya Tanjung Selor, berhadapan dengan Tanjung Palas, Ibukota kesultanan Bulungan, memicu lahirnya kedatangan para pendatang yang juga berprofesi sebagai pedagang dari luar bulungan, sehingga terbentuklah perkampungan baru diseberang tanjung palas yaitu di tanjung selor. Wilayah itu tidak hanya dihuni para pendatang berkebangsaan keturunan arab yang kemudian membuat pemukiman yang bernama kampung Arab, namun juga di ikuti tumbuhnya kantong-kantong pemukiman lain yang menyebar di sekitar tepi sungai ditanjung selor, selain orang-orang keturunan Arab, tanjung selor juga dihuni suku bangsa lain seperti orang-orang Tidung, Bugis, Jawa, Melayu (Sumatra), Banjar dan orang Cina. Tumbuhnya kantong-kantong pemukiman ditanjung selor ini bukannya disebabkan adanya kegiatan usaha dagang saja, namun juga karena adanya migrasi dalam skala yang cukup besar dari tanah asal mereka. Sebagian besar dari

mereka masuk dalam kelompok Orang-orang Melayu sehingga mudah melakukan pembauran dalam masyarakat.

Adanya interaksi dagang pada masa itu berkembang menjadi semacam saling tukar menukar keahlian dalam bidang teknik dan perdagangan, contohnya pengetahuan tentang teknik membuat perahu dan kapal, pengetahuan tentang arah mata angin dalam pelayaran, pengetahuan tentang letak suatu wilayah disepanjang pantai timur Kalimantan (Geografi), pengetahuan tentang Komoditi Ekspor Impor, Peredaran mata uang, dan yang paling penting adalah pengetahuan tentang penggunaan tulisan dan bahasa Melayu yang digunakan sebagai Lingua Franca (Bahasa Internasional) sebagai bahasa pengantar.

### **Sketsa Sejarah Bulungan di Kalimantan Timur**

Suku Bulungan adalah etnis yang mendiami kabupaten Bulungan Kalimantan Timur. Ibu kota Kabupaten Bulungan sendiri adalah Tanjung Selor. Dahulu suku Bulungan adalah suku bangsa penutur (menyampaikan sebuah peristiwa dengan cara dilisankan, Oral Tradition). Sehingga mereka tidak memiliki abjad tersendiri. Nanti setelah agama Islam masuk baru mereka mulai mengenal tulis-menulis huruf Arab murni maupun huruf Jawi (Arab-Melayu). Sejarah terbentuknya Masyarakat Bulungan, menurut cerita masyarakat setempat yang turun temurun berawal dari kisah kehidupan Ku Anyi. Ku Anyi adalah seorang kepala Suku Dayak Hupan (Dayak Kayan Uma Apan) mereka tinggal di hilir Sungai Kayan, mula-mula mendiami sebuah perkampungan kecil yang penghuninya hanya terdiri atas kurang lebih 80 jiwa di tepi Sungai Payang, cabang Sungai Pujungan.

Ku Anyi hingga masa tuanya belum dikaruniai seorang anak. Suatu hari, pada saat Ku Anyi berburu di hutan, ia mendengar suara aneh. Anjingnya menggonggong keras ke arah sebatang bambu betung dan sebutir telur di atas pohon Jemlai. Kemudian dengan rasa penasaran Ku Anyi membawa pulang bambu betung dan sebutir telur dan diletakkan di perapian dapur. Tiba-tiba saja keesokan harinya kedua benda tersebut berubah menjadi bayi laki-laki dan perempuan. Ku Anyi dan istrinya pun memberikan nama kepada kedua bayi tersebut. Untuk bayi laki-laki diberi nama Jauwiru yang artinya “si Guntur Besar” dan bayi perempuan diberi nama Lemlai Suri. Hingga dewasa keduanya pun di kawinkan. Peristiwa aneh ini kemudian dinamakan Bulungan oleh masyarakat yang artinya “bambu dan telur”, pada perkembangannya menjadi Bulungan.

Namun terdapat juga versi lain mengenai asal usul kata Bulungan. Dalam versi ini menyebutkan Bulungan berasal dari perkataan “Bulu Tengon” yang artinya bamboo betulan, karena perubahan dialek dari bahasa Bulungan kuno ke bahasa Melayu menjadi Bulungan. Sebutan ini digunakan sampai saat ini. Dari cerita rakyat mengenai Bulungan itulah terlahir seorang calon pemimpin yang diberi nama Jauwiru. Dan dalam perjalanan sejarah keturunan, lahirlah Kesultanan Bulungan. Karena itulah hingga sekarang mayoritas masyarakat Bulungan adalah Islam, yang jika dilacak meraka telah menganut agama Islam sejak zaman Kesultanan. Salah satu warisan tradisi lama yang masih bertahan hingga sekarang salah satu yang populer adalah perayaan Birau, yaitu pesta yang diadakan secara meriah oleh seluruh masyarakat. Perayaan Birau awalnya dilaksanakan pada masa Kesultanan Bulungan untuk

memperingati syukuran khitanan anak raja-rajanya. Sebagai upaya untuk melestarikan adat istiadat, perayaan Birau tetap terus diselenggarakan.

Secara umum dapat dikatakan sumber mata pencaharian suku Bulungan adalah bertani, berladang dan berdagang. Namun seiring perkembangan zaman mata pencahariannya kini telah meluas dan beragam-ragam sebagaimana kota-kota besar lainnya di kepulauan Kalimantan pada umumnya. Meski demikian ketergantungan dari sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan lebih dominan hingga sekarang.

Namun Bulungan kini tak bisa digambarkan sebagaimana 10-20 tahun yang lalu, baik secara ekonomi-politik, sosial, budaya maupun ekologis. Penanda penting dari perubahan dan dinamika di Bulungan adalah ekspansi beragam jenis pembangunan di beragam sektor, baik infrastruktur, perumahan, perkantoran penataan kota hingga ekspansi perkebunan sawit dan sektor pertambangan yang membawa serta ragam infrastruktur pendukung sekaligus dampak-dampak sosial, ekonomi politik hingga ekologisnya. Hadirnya perkebunan sawit dan pertambangan di Bulungan memiliki pengaruh kuat menggerakkan beragam dinamika sosial dan dampak yang spesifik secara ekologis bagi masyarakat desa di Bulungan. Sebab, hingga kini sulit dijumpai kooperasi sawit dan pertambangan di Bulungan yang hormat pada prinsip ekologis dan hak masyarakat lokal/adat. Akibatnya, ragam konflik agraria dan eksklusi masyarakat adat masih kerap terjadi, diikuti ragam krisis sosial-ekologis yang mengancam keberlanjutan ruang hidup dan kehidupan banyak masyarakat pedesaan, sebagaimana akan diuraikan dalam dua desa yang menjadi fokus studi ini.

Namun demikian, di tengah ragam krisis sosial ekologis akibat industri ekstraktif pertambangan dan ekspansi perampasan tanah skala luas (*land grabbing*) perkebunan sawit di Bulungan, masih menyisakan inisiatif dan respon masyarakat adat/desa yang berusaha “bertahan” dan tangguh menunjukkan daya lenting (resiliensi) nya. Inisiatif dan usaha untuk tetap tangguh (resilien) dari masyarakat desa baik yang berbasis adat maupun non adat yang muncul di Desa Long Beluah (Adat) dan Ardi Mulya (Ttansmigran) atas kepungan dampak ragam krisis sosial-ekologis ini menjadi pembelajaran yang layak menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya di Indonesia, termasuk rupa-rupa masalah dan tantangan yang hadir menghinggapi mereka sekarang dan akan datang.

### **Mengapa Penting Studi ini?**

Salah satu fokus dari Walhi dalam upaya penyelamatan lingkungan dan seluruh ekosistem kehidupan di dalamnya adalah mendorong dan mempromosikan pembelajaran serta penguatan-pengutan yang disebut dengan Wilayah Kelola Rakyat (WKR). Walhi hendak mendeskripsikan WKR sebagai berikut: “suatu sistem pengelolaan kawasan masyarakat yang integratif dan partisipatif dalam hal sistem tenaga kerja, manajemen, produksi dan konsumsi melalui mekanisme praksis, yang selalu memperhatikan sumber daya alam dan fungsi lingkungan sebagai pendukung utama mata pencaharian masyarakat yang sesuai dengan nilai dan kearifan lokal untuk tujuan kemakmuran yang adil dan berkelanjutan. Ruang lingkup dari tujuan WKR setidaknya meliputi tiga hal penting: (1) Penguatan dan pemulihan ragam bentuk kelola SDA berkelanjutan dan ekologis dari bawah; (2) Mendorong pengakuan dan perluasan ragam manajemen komunitas lokal, (3) Kampanye dan promosi

pengetahuan dan sistem kelola selaras alam untuk keberlanjutan ekologis. Seluruh tujuan ideal dari WKR ini dilakukan dalam prinsip-prinsip keadilan, demokratis, partisipatif, kesetaraan dan penghargaan yang serius atas kekayaan lokal masyarakat.

Di sisi lain, Walhi penyebab krisis ekologis di Indonesia adalah akibat dari praktik sistem ekonomi kapitalisme, diperkuat oleh rezim neo-liberalisme dan militeristik yang melihat kekayaan alam hanya sebagai komoditas tanpa pernah mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Hal ini semakin kuat terjadi saat Negara melakukakan pendelegasikan seluruh penguasaan dan pengelolaan kekayaan alam lebih banyak diberikan kepada korporasi skala besar. Atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, rakyat dan alam hanya dijadikan objek, sehingga Negara justru melegitimasi praktik perampasan tanah, air dan seluruh sumber-sumber agraria dan kehidupan rakyat lainnya. Akibatnya, berbagai inisiatif-inisiatif rakyat dalam mengelola kekayaan alamnya dengan berbagai pengetahuan dan kearifan lokal yang dimilikinya sejauh ini masih banyak yang tidak diakui oleh negara. Berbagai pengetahuan dan kearifan lokal tersebut, dalam banyak kasus malah turut dihancurkan melalui mesin-mesin pembangunan industri ekstraktif dan *land grabbing*. Pada praktiknya, banyak kelompok perempuan, dan kelompok marjinal lainnya di pedesaan banyak menjadi kelompok yang paling terdampak berbagai krisis sosial-ekologis yang hadir. Akumulasi pengerukan kekayaan alam dan penghisapan tenaga-tenaga rakyat telah menyebabkan terjadinya berbagai krisis yang sulit dipulihkan. Krisis-krisis ini pada gilirannya telah mengancam kelangsungan sumber-sumber kehidupan rakyat dan mengakibatkan bencana ekologis di seluruh penjuru nusantara. Akibatnya diperlukan satu strategi besar dan bersama-sama untuk mengerem dan bahkan menghentikan penghancuran dan kerusakan lebih luas yang akan berakibat pada bencana ekologis yang leboh besar. Di sisi lain, penting untuk menunjukkan pembelajaran lokal yang mampu menjadi inspirasi praktik empirik dari masyarakat dalam menghadapi masalah dan tantangan di atas.

Dengan dasar pertimbangan di atas, studi ini bertujuan untuk menggali dan menunjukkan praktik-praktik sosial dan ekologis masyarakat lokal dan masyarakat adat di wilayah Bulungan dalam pengelolaan sumber daya alam yang masih didasarkan pada pengetahuan lokal dan kearifan tradisionalnya. Pada tahap berikutnya, dengan mendasarkan pada konsep dan tujuan dari WKR, yang juga meliputi perubahan dan koreksi pada tata kelola dan sistem produksi masyarakat yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan, maka ke depan penting memperkuat pembelajaran temuan studi ini untuk penguatan/advokasi kebijakan yang peka pada pemulihan kerusakan agro-ekologi. Salah satunya adalah penekanan pada upaya-upaya memperkuat strategi loby dan advokasi yang kuat ke para pemangku kebijakan agar tujuan pemulihan daya dukung ekosistem dan kedaulatan hak rakyat atas mata pencaharian lokal, pangan, air, dan energi dapat terwujud. Dengan demikian, studi ini hanyalah satu cara awal untuk membangun pengalaman-pengalaman dari bawah berbasis kasus empirik (*evidence bases policy*) agar dapat menjadi inspirasi dan pembelajaran yang lebih luas di tempat-tempat lainnya di Indonesia.

## Masalah Utama Studi

Secara khusus studi ini dilakukan di dua lokasi; Desa Long Beluah dan Ardi Mulyo, desa Panca Agung di Kabupaten Bulungan –Kaltara ini lebih memfokuskan pada upaya “memetakan akar masalah krisis sosial-ekologis pedesaan dan ragam dampaknya”, dari laju ekspansi rezim penguasa lahan skala luas (*land grabbing*) perkebunan sawit dan industri ekstraktif pertambangan dan proyek pembangunan turunannya Ragam dampak tersebut meliputi dimensi sosial-agraria, ekonomi dan ekologi.

Studi pemetaan sosial ini penting untuk menunjukkan argumen di dua hal sekaligus: (1) “Apa yang hilang/rusak, apa yang berubah, dan apa yang masih bertahan (resiliensi) masyarakat desa ketika ekspansi rezim *land grabbing* masuk di wilayah mereka?”, (2) Respon, aksi dan inisiatif apa saja yang muncul dari masyarakat desa, untuk menghadapi desakan rezim *land grabbing* dan industri ekstraktif yang hadir di sekitar mereka? Dan, (3) apa saja ragam masalah dan tantangan yang potensial hadir dihadapi masyarakat desa/adat, selanjutnya?

## Tujuan Utama Studi

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Memetakan masalah, tantangan dan dampak utama dari industri ekstraktif pertambangan dan perkebunan sawit di pedesaan baik sosial-ekonomi dan ekologi.
2. Menggali dan membandingkan dampak dari dua sistem pengelolaan yang berbeda (WKR dan perkebunan industri) pada mata pencaharian masyarakat dan IPG di wilayah sungai Kayan.
3. Mengidentifikasi potensi dan inisiatif peningkatan ekonomi komunitas, melalui penguatan IPGs (Pangan, air, bio diversitas, dan ketahanan terhadap perubahan iklim).
4. Menjelaskan inisiatif dan strategi komunitas untuk melindungi lahan dan ruang hidup mereka dari konsesi industri perkebunan sawit dan pertambangan.
5. Mempromosikan kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya nilai-nilai sistem pemanfaatan lahan Agro-ekologis, baik untuk mata pencaharian masyarakat dan untuk menjaga jasa ekosistem di wilayah sungai Kayan dan sebagai alternatif untuk bentuk penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan (perkebunan industri; penebangan hutan untuk kayu atau tambang, dll.).

## Lokasi Utama Riset Studi



Desa Ardı Mulyo, kecamatan Tanjung Palas Utara, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara. Mewakili jenis desa transmigrasi dengan agro ekologi pertanian sawah dataran rendah. Tantangan utamanya adalah ekspansi dan dampak pertambangan.



Desa Long Beluah, kecamatan Tanjung Palas Barat, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara. Mewakili jenis desa adat (multi etnis), dengan agro ekologi wilayah pertanian ladang pinggiran sungai. Degan tantangan utama eskpansi masuknya ekspansi perkebunan sawit perkebunan sawit.



\*Desa Long Beluah (berada pada kedua sisi sungai) memiliki tutupan hutan cukup luas, namun sebagian besar dikuasai konsesi kehutanan.

## Metodologi Riset

Riset ini juga menggunakan IPGs (International Public Goods) sebagai pendekatan, untuk melihat dampak serta kemampuan resiliensi dalam yang dimiliki oleh Komunitas. IPGs meliputi 4 “barang publik” beserta keseluruhan ekosistem yang mempengaruhinya. Yaitu : Air, Keamanan Pangan, Ketahanan terhadap perubahan iklim, dan Biodeversitas.

Dalam praktik lapangnya studi ini lebih banyak menggunakan metode kualitatif dengan prinsip-prinsip dasar *Participatory Action Research* (PAR). Penggalan data dilakukan melalui pengamatan terlibat, *indept interview* dan diskusi kelompok dengan para pelaku di lapangan (petani dan masyarakat desa) dalam beragam levelnya, termasuk tokoh adat, perangkat desa, dan juga jaringan pendamping masyarakat.

Di awal studi dilakukan assesment awal, analisis dokumen dan pustaka terkait kondisi terkini di lokasi studi. Studi lapang dilakukan kurang lebih selama 3 minggu, oleh dua Tim (Lokal dan Luar). Pengolahan dan analisis data dilakukan dalam perspektif kritis; melihat persoalan krisis ekosistem sebagai masalah struktural akibat ragam relasi kuasa (ekonomi-politik dan ekologi) yang timpang dan adanya struktur tidak adil yang tetap lestari tanpa koreksi. Kemudian pembahasan hasilnya akan ditambahkan dengan refleksi dan rekomendasi untuk memastikan “gagasan” bisa mendarat dalam implementasi dan perbaikan strategi kebijakan yang lebih adil. Dengan tujuan akhir membongkar ragam kebijakan dan konsesi *land grabbing* dan industri ekstraktif yang menyebabkan yang sering mengabaikan hak, akses dan keselamatan ruang hidup rakyat, pengetahuan dan nilai-nilai lokal serta prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

## Temuan dan Pembahasan

### Gambar Umum Dua Desa Lokasi Studi

#### A. Desa Ardimulyo

Desa Ardimulyo adalah seduah desa transmigrasi yang berawal pada tahun 1985 dengan nama awal UPT (Unit pemukiman transmigrasi) atau SP (Satuan pemukiman) IV. Gelombang trans pertama datang di desa ardi mulyo pada tahun 1985 berasal dari daerah magelang berjumlah kurang lebih 20 kepala keluarga, disusul dengan gelombang transmigrasi dari daerah Lumajang, Klaten, Surabaya, Lombok, dan yang terakhir daerah Lamongan. Seperti halnya daerah transmigrasi di pulau Kalimantan lainnya, Ardimulyo merupakan daerah hutan yang masih asri. Hal tersebutlah yang membuat sebagian transmigran tidak bertahan lama di desa Ardimulyo (pergi meninggalkan ardimulyo). Bahkan pada awal kedatangan gelombang transmigran di desa Ardimulyo, penduduk yang bertahan hanya kurang lebih 33 kepala keluarga. Hal tersebut disebabkan oleh sulitnya medan (tanah berlumpur dan berbukit-bukit), sulitnya akses mobilitas dimana hanya ada jalan setapak dengan lebar 3 meter dan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki, sulitnya transportasi dimana satu-satunya jalur transportasi hanyalah transportasi air melalui Sungai Ancam, dan pada saat itu belum ada masyarakat yang memiliki perahu ataupun speedboat. Untuk sampai ke

sungai ancam pun harus ditempuh dengan berjalan kaki melintasi jalan setapak yang masih tertutup semak belukar dan pohon-pohon tumbang ditambah masih banyaknya hewan liar seperti monyet, babi dan beruang.

Karena banyaknya masyarakat yang pergi dari Ardimulyo, pemerintah setempat sempat membuat kebijakan untuk melarang masyarakat pindah atau keluar dari Ardimulyo. Bahkan pada saat itu sampai-sampai ditempatkan seorang babinsa untuk berjaga dan mengawasi masyarakat agar tidak pindah. Tetapi masyarakat tetap saja banyak yang pindah, untuk menghindari penjagaan babinsa masyarakat bergerak pindah secara sembunyi-sembunyi pada pukul 02-00 sampai 03.00 pagi. Mereka rela berjalan kaki puluhan kilo meter sambil membawa barang-barang mereka di pagi buta hanya untuk pindah ke desa lain atau pulang ke kampung halaman mereka di tanah jawa. Kurangnya jumlah penduduk menjadi hal yang serius pada saat itu, dikarenakan salah satu syarat menjadi desa definitif adalah terpenuhinya kuota penduduk sebesar 200 kepala keluarga. Menyikapi hal tersebut kepala desa persiapan bapak suparman membuat kebijakan untuk mengajak orang-orang trol (nelayan dan penyedia bahan baku yang menggunakan speed boat, umumnya berasal dari suku bugis) naik ke desa dan bermukim di Desa Ardimulyo, sehingga tercukupinya kuota penduduk untuk menjadi desa definitif.

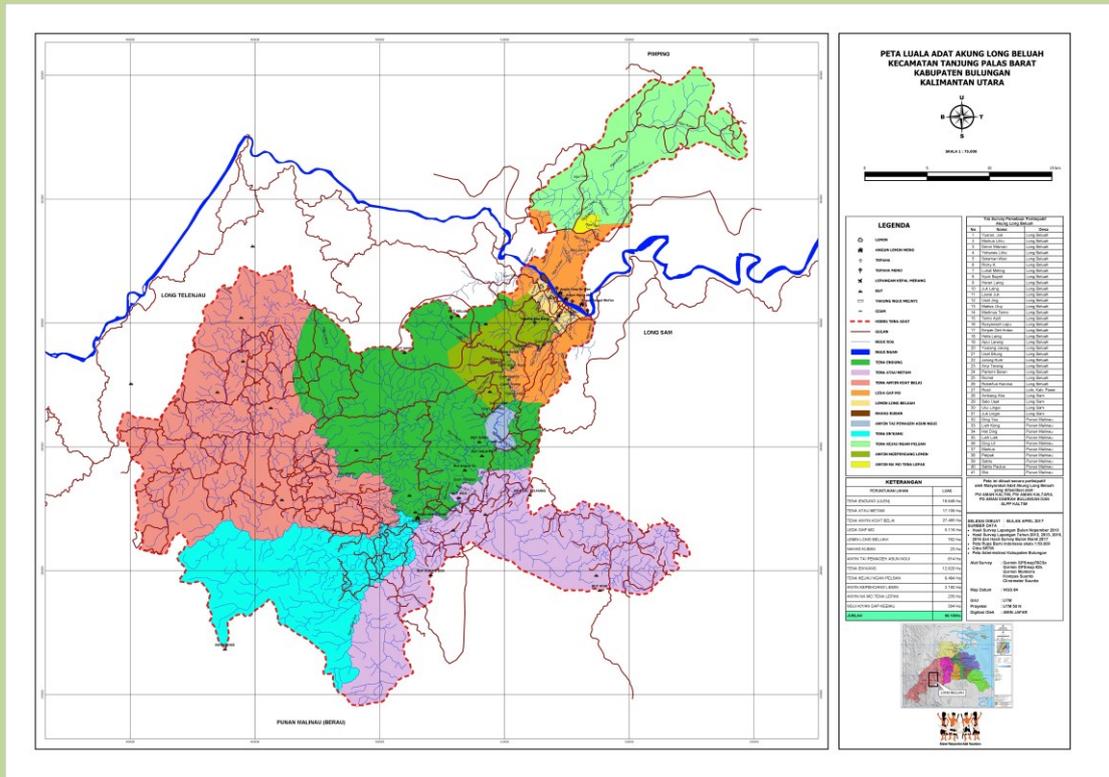
Orang-orang trol tersebut bermukim di seputar Sungai Ancam. Mereka memilih tinggal di seputar sungai ancam karena profesi mereka sebagai nelayan yang memang sangat tergantung dengan sungai dan juga mereka lebih terbiasa dengan aktifitas di seputaran sungai. Orang-orang inilah yang kemudian memajukan transportasi air sungai ancam, sebagian mereka menjadi motoris speed boat yang melayani penyebrangan ke daerah tarakan. Mereka juga menyediakan jasa kapal bagi masyarakat ardi mulyo yang ingin menjual hasil bumi mereka ke kota tarakan. Dari situ semualah akses ardimulyo mulai terbuka untuk daerah luar. Dan pada saat itu Sungai Ancam menjadi pintu masuk perekonomian Desa Ardi Mulyo. Tokoh yang berjasa ialah Pak Muchlis, orang yang pertama kali menghadirkan speedboat dan kapal tongkang di Sungai Ancam. Hingga pada tahun 1998 Desa Ardimulyo berhasil menjadi desa definitif.

Pada tahun 1991, atas permintaan kantor Departemen Transmigrasi kepada Kepala UPT, agar setiap Desa persiapan diberi nama, maka tercetuslah nama Ardi Mulyo sebagai pengganti UPT IV Salimbatu dengan dasar falsafah: Ardi yang mempunyai arti "*Bumi*" dan Mulyo yang artinya "*Kemuliaan*". Tokoh yang terkait dengan pencetusan nama Desa Ardi Mulyo diantaranya adalah Bapak (Alm.) Ahmad Soko Bpk Muawam, BA (KUPT IV), Bpk M. Maksum, Bpk Afan Puryanto Bapak Suparman(mantan Kades)dan di bantu oleh tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Tokoh Pemuda dan yang lain, kemudian disepakati bahwa Desa ini dinamakan Desa Ardi Mulyo. Dengan nama "Ardi Mulyo" ini diharapkan kelak desa ini menjadi lebih mulia, maju, dan tentram agar sesuai dengan yang diharapkan oleh tokoh-tokoh dan *Pinisepuh* yang mencetuskan nama Desa Ardi Mulyo.

## B. Desa Long Beluah

Desa ini awal mula bernama kampung Angun Lemlai. Mayoritas penduduknya suku Dayak Kayan Ga'ai Kung Kemul dan dipimpin oleh seorang *Pembakal* atau kepala kampung. Meski demikian dalam perjalanan sejarahnya kini desa ini telah dihuni multi etnis, selain Suku Dayak Kayan, Kenyah ada juga suku Jawa, Bugis, Toraja, Timor (NTT) hingga etnis China. Menurut penelusuran sejarah kampung ini sudah ada sejak 1531 M, pada zaman Kesultanan Bulungan. Desa dengan luas wilayah 244,20 km<sup>2</sup> ini dihuni oleh 516 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 3.216 jiwa. Berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2002 pembentukan kecamatan Tanjung Palas Barat, desa Long Beluah menjadi pusat pemerintahan kecamatan.

Dipilihnya Desa long beluah sebagai pusat pemerintahan kecamatan, bukan tanpa sebab. Sejak 1973 PT. Sumber Mas pemegang ijin konsesi HPH pertama beroperasi di wilayah Desa Long Beluah, inilah yang menjadi "*pull factor*" (faktor penarik) yang membuat pendatang dengan ragam suku dan asimilasi budaya, Jawa, Sulawesi, Banjar dll hadir di Desa Long Beluah. Industri kayu bergerak, pergeseran sistem ekonomi berkembang. Masyarakat yang awalnya bergantung dengan kawasan hutan mulai beralih ke sistem industri dan menjadi pekerja perusahaan. Disinilah titik tolak hilangnya akses masyarakat terhadap tanah dan sumber penghidupan, hingga perusahaan perkebunan sawit datang. Tak hanya tanah yang hilang, belakangan sumber air bersih pun mulai terganggu akibat massifnya alih fungsi hutan dan lahan. Cara pandang warga desa long beluah terhadap wilayah kelola mereka pun berubah. Mereka tidak lagi menganggap wilayah kelola mereka sebagai sumber ekonomi, melainkan menjadi pekerja perusahaan lah sarta-satunya sumber ekonomi. Masyarakat desa long beluah pun rela menjual lahan mereka ke perusahaan, yang nantinya akan dijadikan kebun kelapa sawit. Hal itu didukung dengan ketidak tahuan masyarakat akan dampak perbuatan mereka terhadap kelestarian lingkungan hidup mereka. Masyarakat termakan bujuk rayu perusahaan yang menjanjikan akan memeberikan lahan plasma bagi siapa saja yang mau menjual lahannya ke perusahaan. Hal itu juga terjadi karena masyarakat tidak mengetahui akan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perkebunan kelapa sawit khususnya tentang lahan plasma.



\*Peta Wilayah Adat, Hasil Pemetaan Partisipatif Komunitas Adat di Long Beluah, tahun 2017

Pada desember 2016, setelah upaya berbagai kelompok, pemerintah daerah kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara akhirnya mengesahkan Peraturan Daerah No 12 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Meskipun telah ada Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kab. Bulungan, namun aturan itu juga membuka peluang “pengambilalihan” sepanjang dipenuhinya kompensasi, pendekatan ganti rugi ini bertentangan dengan konsep perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Peluang tersebut terlihat dalam pasal 14 Perda tersebut.

*Pasal 14*

*MHA berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas Tanah Ulayat, Wilayah Adat, dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan dari Masyarakat Hukum Adat.*



SALINAN

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT

\*Peraturan Daerah Kab. Bulungan No 12 tahun 2016, tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat.

Secara umum, kondisi pertanian di 3 desa, dan 2 kecamatan (Tanjung Palas Barat, dan Tanjung Palas Utara) tempat studi ini dilaksanakan merupakan lumbung pangan, (padi ladang), 2 kecamatan dimana lokasi riset ini dilaksanakan memiliki luasan padi ladang paling luas dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), “Bulungan dalam Angka 2016”, Kecamatan Tanjung Palas Barat seluas 2.716 Ha (lokasi riset di desa Long Beluah), kecamatan Tanjung Palas Barat seluas 2.698 Ha (lokasi riset di desa Ardi Mulya dan Long Panca Agung):

## Temuan Studi dan Analisa

### Sumber Krisis Sosial-Ekologis Bermula; Pertambangan dan Perkebunan

#### A. Ancaman Pertambangan dan Dampaknya

Terhitung hingga maret 2018 saja, kerugian negara dari sektor tambang di Kalimantan Utara mencapai Rp 201 miliar. Dari 45 perusahaan yang berakhir SK-nya, sekitar 86 persen perusahaan yang menunggak PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Total piutang PNBPN yang menunggak mencapai Rp 201 miliar, hal tersebut terlihat dari Surat Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI Nomor 5560/84/DBN.PW/2017.<sup>2</sup>

Kompleksnya persoalan pemberian izin tambang ini bisa dilihat dari pernyataan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Utara, Ferdy Manurun Tanduklangi, yang mengungkapkan, dari 102 perusahaan tambang mineral dan batu bara di Kalimantan Utara yang diberikan sanksi penghentian sementara, hanya 16 perusahaan dipastikan telah memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan atau pasca tambang angka ini baru sampai november 2017 saja.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Lihat: <http://kaltim.tribunnews.com/2018/03/12/45-perusahaan-tak-setor-jamrek-jatam-kaltara-sebut-kerugian-negara-rp-201-miliar>

<sup>3</sup> Lihat: <http://kaltim.tribunnews.com/2017/11/20/102-izin-tambang-di-kaltara-dihentikan-sementara>



\*Kawasan Pertambangan di Sekitar Ardi Mulya

Seperti umum yang diketahui, praktik pertambangan batubara, khususnya di wilayah kepulauan Kalimantan, telah terbukti mencipta dampak krisis sosial- ekologis. Secara sosial, praktik pertambangan identik dengan konflik agrarian di satu sisi dan marginalisasi di sisi lainnya. Akar masalahnya adalah perampasan sepihak oleh koperasi umumnya sejjin Negara, di tanah-tanah yang telah dimiliki masyarakat. Asumsi dasarnya, tanah-tanah yang digarap oleh warga tak berstatus “illegal” dalam domain Negara. Sehingga boleh diberikan untuk melayani kepentingan koperasi tambang, umumnya demi tujuan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Konflik lahan kerap terjadi antara perusahaan dengan masyarakat lokal yang lahannya menjadi obyek pengusuran. Kerap perusahaan menunjukkan kearogansiannya dengan menggusur lahan tanpa melewati persetujuan pemilik atau pengguna lahan. Atau tak jarang mereka memberikan ganti rugi yang tidak seimbang dengan hasil yang akan mereka dapatkan nantinya. Tidak hanya konflik lahan, permasalahan yang juga sering terjadi adalah diskriminasi. Akibat dari pergeseran ini membuat pola kehidupan mereka berubah menjadi lebih konsumtif. Bahkan kerusakan moralpun dapat terjadi akibat adanya pola hidup yang berubah.

Tak heran, masyarakat lokal/adat melawan untuk merebut kembali tanah dan sumber agraria yang terampas paksa. Inilah penyebab ragam konflik agraria di wilayah pertambangan, juga di perkebunan, kehutanan, kelautan dst, yang banyak dijumpai di seluruh pelosok nusantara, tak terkecuali di Bulungan Kaltara.

Secara ekologis, aktivitas pertambangan telah terbukti dapat pencemaran lingkungan di sekitar lokasi penambangan. Pencemaran tersebut antara lain meliputi, setidaknya : (1) Pencemaran Air, (2) Pencemaran Tanah, (3) Pencemaran Udara, (4) Perusakan Hutan.

*Pertama*, Pencemaran Air. Penambangan batubara secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah pencucian batubara tersebut dalam hal memisahkan batubara dengan sulfur. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai sehingga warna air sungai menjadi keruh, asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian batubara tersebut. Limbah pencucian batubara setelah diteliti mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya

dikonsumsi. Limbah tersebut mengandung belerang (b), merkuri (Hg), asam slarida (HCn), mangan (Mn), asam sulfat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), dan timbal (Pb). Hg dan Pb merupakan logam berat yang dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit.



\*Aktifitas Bongkar Muat Batubara, tumpahan batubara ke wilayah sungai mengakibatkan rusaknya ekosistem di sekitar sungai

**Kedua**, Pencemaran Tanah. Tidak hanya air yang tercemar, tanah juga mengalami pencemaran akibat pertambangan batubara ini, yaitu terdapatnya lubang-lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali yang menyebabkan terjadinya kubangan air dengan kandungan asam yang sangat tinggi. Air kubangan tersebut mengandung zat kimia seperti Fe, Mn, SO<sub>4</sub>, Hg dan Pb. Fe dan Mn dalam jumlah banyak bersifat racun bagi tanaman yang mengakibatkan tanaman tidak dapat berkembang dengan baik. SO<sub>4</sub> berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah dan PH tanah, akibat pencemaran tanah tersebut maka tumbuhan yang ada di atasnya akan mati.

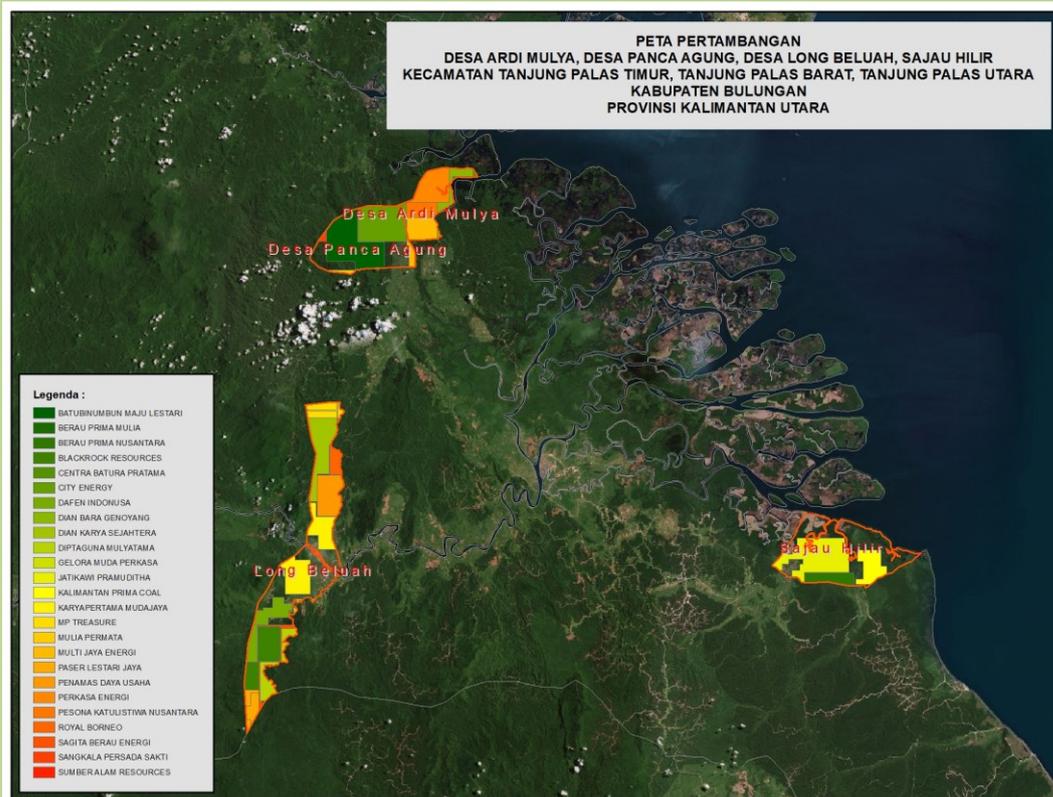


\*Lubang tambang terbuka, bukan hanya mencemari air, tetapi juga meracuni tanah, Pulau Kalimantan tercatat sebagai tempat dengan lubang tambang batubara terbuka terbanyak. Di Kalimantan Utara banyak perusahaan tambang mendapatkan sanksi karena tidak memenuhi kewajiban reklamasi.

**Ketiga**, Pencemaran Udara. Penambangan batubara menyebabkan polusi udara, hal ini diakibatkan dari pembakaran batubara. Menghasilkan gas nitrogen oksida yang terlihat cokelat dan juga sebagai polusi yang membentuk *acid rain* (hujan asam) dan ground level ozone, yaitu tipe lain dari polusi yang dapat membuat kotor udara. Selain itu debu-debu hasil pengangkutan batubara juga sangat berbahaya bagi kesehatan, yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan (ISPA), dan dalam jangka panjang jika udara tersebut terus dihirup akan menyebabkan kanker, dan kemungkinan bayi lahir cacat.

**Keempat**, Kerusakan Hutan. Bahan tambang merupakan bahan yang berada didalam bumi sehingga untuk mengambilnya perlu dilakukan penggalian. Batubara merupakan salah satu bahan tambang yang banyak ditemukan dikawasan hutan yang tua karena proses terbentuknya batubara merupakan sedimentasi dari tanaman pada zaman purba yang mengalami proses penimbunan hingga ribuan tahun. Dalam upaya eksploitasi bahan tambang batubara ini, perlu dilakukan perluasan area tambang untuk memudahkan mobilitas pengangkutan dan pengambilan batubara tersebut. Kawasan hutan yang memiliki potensi batubara harus disingkirkan atau ditebang untuk dilakukan penggalian. Karena besarnya sumber daya batubara pada suatu lokasi maka luas area hutan yang disingkirkan untuk kegiatan tersebut semakin luas.

Pertambangan di kepulauan Kalimantan, termasuk di wilayah Bulungan Kaltara, khususnya batubara, yang banyak dikenal dengan emas hitam, telah lama menjadi momok bukan hanya soal nasfu ekstraktifnya yang makin ekspansif abai ketidakadilan ekologis. Namun lebih dari itu, dampak turunannya adalah mendorong dampak turunan berupa *illegal mining* yang tak kalah mengancamnya atas keberlanjutan dan daya dukung ekologis. Beragam dampak petambangan di atas di atas ini juga mudah di jumpai di banya desa di wilayah Kabupaten Bulungan, Kaltara, termasuk di wilayah desa Argomulyo. Sehingga penting satu proses serius untuk pemulihan lebih lanjut agar tidak semakin memperburuk nasib manusia dan lingkungannya.



\*Peta Wilayah Tambang di 4 Desa (Wilayah Kerja WALHI) Desa Ardi Mulya, Desa Panca Agung, Desa Long Beluah, dan Desa Sajau Hilir

### Wilayah Tambang di 4 Desa (Wilayah Kerja WALHI)

Desa Ardi Mulya, Desa Panca Agung, Desa Long Beluah, dan Desa Sajau Hilir

NO	DESA	NAMA PERUSAHAAN	JENIS IZIN	LUAS SK (HA)	KOMODITAS	LUAS MASUK DALAM DESA (HA)
1	LONG BELUAH	SAGITA BERAU ENERGI	IUP	10.012	BIJIH BESI	273,56282979500
2	LONG BELUAH	BLACKROCK RESOURCES	IUP	4.772	BATUBARA	2,23053916677
3	LONG BELUAH	DAFEN INDONUSA	IUP	5.053	BATUBARA	850,12671542000
4	LONG BELUAH	DIPTAGUNA MULYATAMA	IUP	8.369	BATUBARA	68,22919184440
5	LONG BELUAH	KARYAPERTAMA MUDAJAYA	IUP	7.763	BATUBARA	2436,88685808000
6	LONG BELUAH	ROYAL BORNEO	IUP	4.966	BATUBARA	430,68758620600
7	LONG BELUAH	PENAMAS DAYA USAHA	IUP	1.658	BATUBARA	1422,10510108000
8	LONG BELUAH	DIAN KARYA SEJAHTERA	IUP	5.006	BATUBARA	1913,79996270000
9	LONG BELUAH	PASER LESTARI JAYA	IUP	8.995	BIJIH BESI	406,72984767800
10	LONG BELUAH	MP TREASURE	IUP	7.957	EMAS	50,57542471140

11	ARDI MULYA	PESONA KATULISTIWA NUSANTARA	PKP2B	21.875	BATUBARA	680,91643015200
12	ARDI MULYA	MULTI JAYA ENERGI	IUP	9.085	BATUBARA	961,42999234500
13	ARDI MULYA	DIAN BARA GENOYANG	IUP	2.510	BATUBARA	589,86409818300
14	ARDI MULYA	CITY ENERGY	IUP	5.152	BATUBARA	160,47283288000
15	ARDI MULYA	CENTRA BATURA PRATAMA	IUP	5.467	BATUBARA	46,55400666150
16	ARDI MULYA	PERKASA ENERGI	IUP	3.603	BATUBARA	1459,26690439000
17	SAJAU HILIR	KALIMANTAN PRIMA COAL	IUP	1.220	BATUBARA	1091,10499565000
18	SAJAU HILIR	JATIKAWI PRAMUDITHA	IUP	5.184	BATUBARA	2952,87226582000
19	SAJAU HILIR	BERAU PRIMA NUSANTARA	IUP	3.248	BATUBARA	783,29991007000
20	PANCA AGUNG	MULTI JAYA ENERGI	IUP	9.085	BATUBARA	240,75166451900
21	PANCA AGUNG	SANGKALA PERSADA SAKTI	IUP	5.033	BATUBARA	60,63825035150
22	PANCA AGUNG	CITY ENERGY	IUP	5.152	BATUBARA	2424,89142613000
23	PANCA AGUNG	BATUBINUMBUN MAJU LESTARI	IUP	4.878	BATUBARA	3151,05380188000
24	PANCA AGUNG	MULIA PERMATA	IUP	7.971	EMAS	93,31200378540
25	LONG BELUAH	SAGITA BERAU ENERGI	IUP	10.012	BIJIH BESI	1750,01691924000
26	LONG BELUAH	BLACKROCK RESOURCES	IUP	4.772	BATUBARA	1750,01691924000
27	LONG BELUAH	SAGITA BERAU ENERGI	IUP	10.012	BIJIH BESI	455,22967894500
28	LONG BELUAH	DAFEN INDONUSA	IUP	5.053	BATUBARA	455,22967894500
29	LONG BELUAH	SAGITA BERAU ENERGI	IUP	10.012	BIJIH BESI	915,18049580500
30	LONG BELUAH	DIPTAGUNA MULYATAMA	IUP	8.369	BATUBARA	915,18049580500
31	LONG BELUAH	SAGITA BERAU ENERGI	IUP	10.012	BIJIH BESI	10,64477527490
32	LONG BELUAH	BERAU PRIMA MULIA	IUP	8.922	BATUBARA	10,64477527490
33	LONG BELUAH	BLACKROCK RESOURCES	IUP	4.772	BATUBARA	160,46639045100
34	LONG BELUAH	PASER LESTARI JAYA	IUP	8.995	BIJIH BESI	160,46639045100
35	LONG BELUAH	ROYAL BORNEO	IUP	4.966	BATUBARA	79,93844355500
36	LONG BELUAH	MP TREASURE	IUP	7.957	EMAS	79,93844355500

37	LONG BELUAH	GELORA MUDA PERKASA	IUP	9.725	BATUBARA	318,85615723700
38	LONG BELUAH	MP TREASURE	IUP	7.957	EMAS	318,85615723700
39	LONG BELUAH	DIAN KARYA SEJAHTERA	IUP	5.006	BATUBARA	293,62065591100
40	LONG BELUAH	MP TREASURE	IUP	7.957	EMAS	293,62065591100
41	LONG BELUAH	SUMBER ALAM RESOURCES	IUP	6.168	BATUBARA	65,97553552380
42	LONG BELUAH	PASER LESTARI JAYA	IUP	8.995	BIJIH BESI	65,97553552380
43	ARDI MULYA	PESONA KATULISTIWA NUSANTARA	PKP2B	21.875	BATUBARA	3,01876839204
44	ARDI MULYA	MULTI JAYA ENERGI	IUP	9.085	BATUBARA	3,01876839204
45	ARDI MULYA	PESONA KATULISTIWA NUSANTARA	PKP2B	21.875	BATUBARA	0,00348464170
46	ARDI MULYA	CITY ENERGY	IUP	5.152	BATUBARA	0,00348464170
47	PANCA AGUNG	CITY ENERGY	IUP	5.152	BATUBARA	0,01089429669
48	PANCA AGUNG	BATUBINUMBUN MAJU LESTARI	IUP	4.878	BATUBARA	0,01089429669
49	PANCA AGUNG	BATUBINUMBUN MAJU LESTARI	IUP	4.878	BATUBARA	0,60415251674
50	PANCA AGUNG	MULIA PERMATA	IUP	7.971	EMAS	0,60415251674

## B. Ancaman Perkebunan dan Dampaknya

Merujuk Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara, Mufied Azwar menjelaskan, berdasarkan catatan laporan dari kabupaten dalam kurun waktu 2015 hingga 2016, setidaknya ada 64 perusahaan yang keseluruhannya merupakan perkebunan sawit. Ke-64 perusahaan tersebut, sebanyak 24 di Kabupaten Bulungan, 7 di Malinau, 22 Nunukan, serta 11 di Kabupaten Tana Tidung (KTT). Hanya perkebunan selain sawit. Yaitu perkebunan karet di Kecamatan Peso. Sedangkan untuk pengelolaan hasil produksi atau pabrik kelapa sawit (PKS) terdapat 10 unit. Yakni 6 di Kabupaten Nunukan, 2 di Bulungan, dan 1 di Kabupaten Malinau. Kalimantan termasuk di Kaltara merupakan daerah yang memiliki perkebunan sawit yang luas. Kondisi itu hampir sama dengan pulau sumatera. Namun, jumlah perusahaan tersebut sangat dimungkinkan telah berubah seiring adanya penambahan izin dan pencabutan izin dikarenakan tidak beroperasi.

Kini, luas lahan perkebunan yang ada di Kabupaten Bulungan berdasarkan IUP sebesar 271.113,48 hektare. Hingga mei 2017, Izin pembukaan lahan sampai dengan Triwulan I Tahun 2017 mencapai 128.289,52 hektare. Dan realisasi pembangunan kebun untuk luas tanam 79.539,34 hektare yakni, kebun inti seluas 68.384,11 hektare (85,98 persen) dan kebun plasma seluas 11.155,23 hektare (14,02 persen). Dari sisi normatif, pemenuhan kewajiban perkebunan untuk menyediakan lahan bagi plasma

seluas 20% dari luasan konsesinya saja tidak terpenuhi, terlebih lagi fakta konflik dan kerusakan lingkungan di lapangan. (<http://kaltim.tribunnews.com/2017/05/19/tak-kunjung-bangun-kebun-plasma-izin-tiga-perusahaan-sawit-ini-akan-dicabut>)



\*Perkebunan Sawit di desa Long Beluah

Sebagaimana banyak studi yang menunjukkan dampak negatif dari perkebunan sawit. Secara umum dapat diklasifikasikan secara topikal maupun yang bersifat dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak negatif langsung dari perkebunan kelapa sawit skala besar khususnya ekologi, ekonomi, sosial, budaya, konflik lahan dan sumber daya agraria, pencemaran lingkungan, pemanasan global, kerentanan pangan, pencemaran air, tanah dan udara.

Secara ekologi pengembangan dan perluasan perkebunan kelapa sawit merupakan proses konversi atau alih fungsi dan bentuk lahan yang merubah bentang alam lahan yang luas sehingga menyebabkan kerusakan fungsi dan jasa lingkungan. Akibatnya, dalam kasus Bulungan, peningkatan bencana banjir terjadi setelah ekspansi sawit masuk. Akibat terjauhnya adalah bentuk-bentuk pencemaran sumber-sumber utama kehidupan masyarakat misalnya: air, udara dan tanah. Hal ini umumnya bersumber dari aktifitas pembukaan lahan perkebunan seperti erosi dan sedimentasi, pembakaran lahan dan hutan, penggunaan bahan kimia pertanian yang bersumber dari pestisida dan herbisida berbahaya, beracun dan sangat mematikan oleh kebun sawit dan gas-gas pencemar lainnya dalam proses dan aktifitas pabrik terpapar dan menguap dalam air, tanah dan udara sekitarnya.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit sangat erat dengan sumber-sumber emisi gas rumah kaca dari proses produksi dan rantai pasok minyak sawit yang mengakibatkan rusaknya fungsi dan kemampuan serapan gas rumah kaca oleh lahan, hutan, dan gambut, termasuk gas-gas yang dihasilkan dari pabrik minyak sawit dan residu gas dari pupuk pertanian bahan kimia dan bahan bakar fosil aktifitas mesin pabrik dan perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, ekspansi perkebunan sawit juga terkait dengan soal peningkatan pemanasan global.

Selain kerusakan lingkungan, investasi perkebunan kelapa sawit juga mengancam keberadaan masyarakat lokal beserta hak-hak tradisionalnya. Secara umum

diskriminasi terhadap masyarakat lokal sangat banyak terjadi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan lahan hutan di Kalimantan Tengah. Seringkali hutan lindung, hutan konservasi dan kawasan tambang ditetapkan oleh pemerintah sendiri tanpa melibatkan komunitas masyarakat lokal. Perubahan bentang alam terutama hutan, lahan, badan air, danau, sungai dst. Akibat lanjutannya menutup, membatasi dan mengurangi kemampuan dan akses masyarakat adat, perdesaan dan petani dalam meneruskan dan memelihara anugrah alam yang selama ini menjadi alat dan faktor yang menjadi sumber mata pencaharian, pangan dan papan mereka. Kasus di Desa Long Beluah, yang berada di pinggiran sungai Kayan merasakan langsung dampak sawit atas perubahan lanskap ekologis sungai. Khusus pada masyarakat adat dan perdesaan perkebunan sawit umumnya berdampak pada berkurang baik mutu dan jumlahnya dengan semakin terbatasnya lahan pertanian dan sumber agraria akibat himpitan dan tekanan perluasan dan penguasaan oleh perkebunan kelapa sawit.



\*Perkebunan sawit di kawasan sekitar desa Ardi Mulya dan Panca Agung, bersebelahan dengan wilayah pertanian masyarakat. Dengan model bentang alam yang relatif datar.

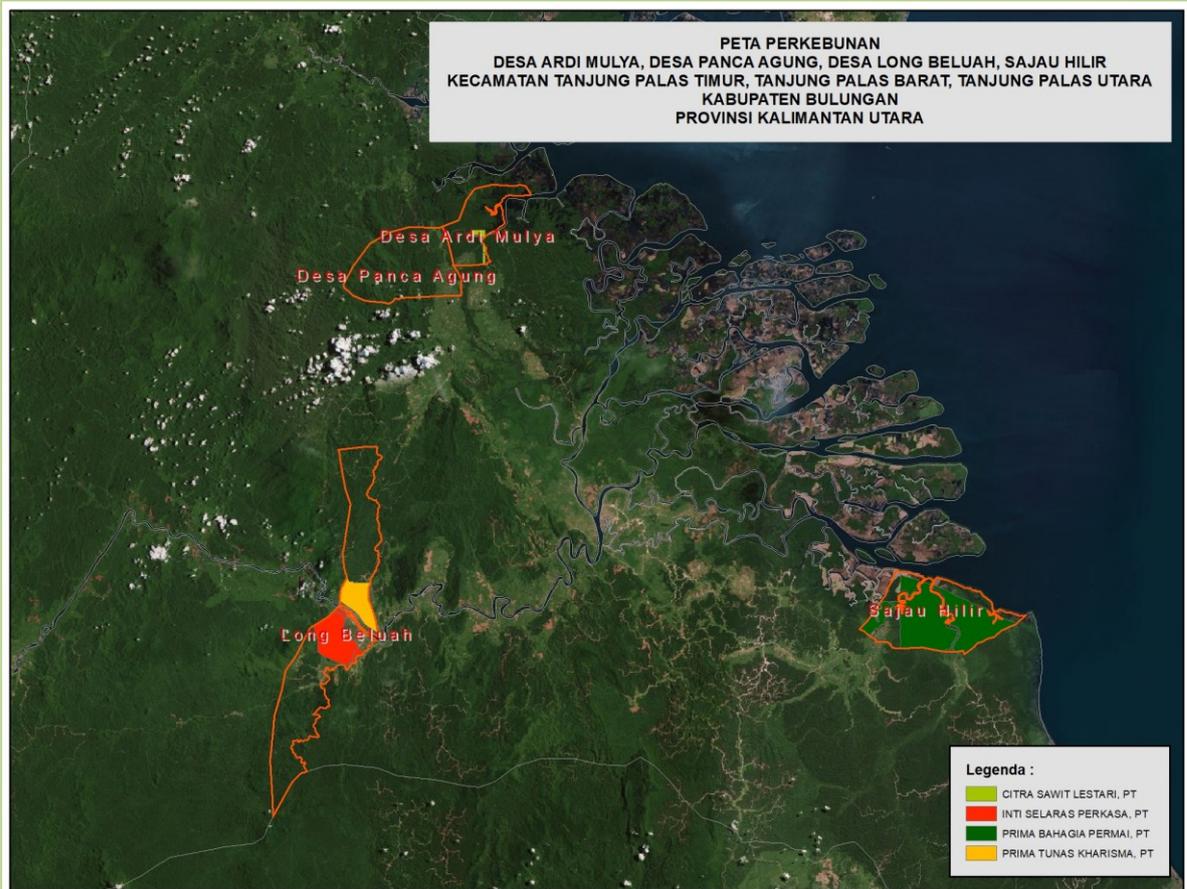


\*Perkebunan Sawit di desa Long Beluah dengan bentang Alam yang berbukit-bukit, Perubahan bentang alam secara ekstrim akan meningkatkan resiko bencana ekologis.

Masuknya perkebunan sawit sekala luas menyebabkan masyarakat kehilangan kemandirian dalam mencukupi kehidupan hidupnya karena kehilangan sumber makanan dan tempat tinggal. Jika ditelusuri lebih dalam masyarakat yang berada di kawasan hutan, sebagaimana masyarakat di Desa Long Beluah, akan lebih mudah untuk menggantungkan hidupnya dari hasil hutan, sebagaimana umumnya masyarakat adat da lokal lainnya, sering memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti berburu dan berladang bahkan tak jarang juga dari mereka memanfaatkan beberapa jenis tanaman untuk dijadikan obat-obatan dan bahan pokok makanan. Pencemaran yang dilakukan pabrik-pabrik besar yang berdiri megah yang terus menerus membuang limbah ke sungai kemudian pupuk kimia yang digunakan, menyebabkan pencemaran sungai yang menyebabkan ikan mati mendadak, air sungai tidak dapat dikonsumsi lagi untuk kehidupan harian masyarakat. Masyarakat Long Beluah yang bergantung dari hutan dan sungai mengalami serius dampak-dampak pencemaran pupuk kimia dari perkebunan sawit yang mengepung mereka. Begitupun masyarakat di Desa Ardi Mulyo yang berada di sekitar pertambangan batu bara.

Secara politik, masyarakat lokal (komunitas adat), sejak ekspansi sawit sering kehilangan jati diri dan kedaulatan dalam menentukan hidupnya. Kehilangan hutan adat menyebabkan masyarakat tidak mampu lagi mengatur hidupnya sendiri. Di Kalimantan Tengah, juga di Kalimantan Utara banyak kasus menyebutkan bahwa masyarakat adat kehilangan hutan adat salah satunya karena perluasan areal perkebunan sawit. Bahkan mereka terpaksa menjadi buruh di tanahnya sendiri. Ada juga yang terpaksa bekerja sebagai buruh penoreh karet di wilayah masyarakat lainnya dan sebagai penambang tradisional. Tak dipungkiri kekuasaan para pemodal dari luar lebih berkuasa ketimbang para pejabat setempat pemberi izin yang harus merelakan nasib rakyatnya terjajah. Tak jarang dari hasil kekuasaan tersebut banyak praktek-praktek buruk yang diperlihatkan oleh para Investor telah membinasakan hak-hak manusia yang berada di dalamnya seperti, kriminalisasi, pengambilan paksa lahan masyarakat, penggusuran perkampungan dan lain-lain.

Selain dampak-dampak langsung, ekspansi perkebunan sawit juga memiliki dampak-dampak tidak langsung lainnya, baik dalam konteks tata kelola (governance), pelanggaran HAM, korupsi, kolusi, lemahnya penegakan hukum, kebakaran hutan dan lahan hingga soal eksploitasi buruh (perempuan dan laki-laki) dan pengabaian hak-ha dasarnya, ketidakadilan gender, pekerja anak, perdagangan manusia, penghindaran pajak, dan perusakan budaya (pengetahuan) lokal lainnya. Beragam dampak-dampak negatif dalam ekspansi perkebunan sawit di atas juga terjadi di wilayah kabupaten Bulungan Kaltara, termasuk dalam kadar tertentu mempengaruhi di lokasi studi khususnya di desa Long Beluah daripada di desa Arsi Mulyo yang lebih terancam dari tambang.



\*Peta Konsesi Perkebunan (Desa Long Beluah, Desa Ardi Mulya, Desa Sajau Hilir )

### Konsesi Perkebunan

\*Desa Long Beluah, Desa Ardi Mulya, Desa Sajau Hilir

No	DESA	SUBYEK_HAK	PENGUNAAN	STATUS	LUASAN HGU (HA)	LUAS Di MASUK DESA (HA)
1	LONG BELUAH	PRIMA TUNAS KHARISMA, PT	Kelapa Sawit	PBT	12035,79089600000	1215,22278024000
2	LONG BELUAH	INTI SELARAS PERKASA, PT	Kelapa Sawit	PBT	2718,81912171000	1711,98958428000
3	LONG BELUAH	INTI SELARAS PERKASA, PT	Kelapa Sawit	PBT	87,23313732050	60,35507904200
4	LONG BELUAH	INTI SELARAS PERKASA, PT	Kelapa Sawit	PBT	84,34495286730	80,85132191370
5	ARDI MULYA	CITRA SAWIT LESTARI, PT	Kelapa Sawit	HGU	92,13060432510	87,83649928180
6	ARDI MULYA	CITRA SAWIT LESTARI, PT	Kelapa Sawit	HGU	18,10279174080	17,35135303640
7	ARDI MULYA	CITRA SAWIT LESTARI, PT	Kelapa Sawit	HGU	18,03379780160	17,28325621910
8	ARDI MULYA	CITRA SAWIT LESTARI, PT	Kelapa Sawit	HGU	49,10535570490	29,43311733480
9	ARDI MULYA	CITRA SAWIT LESTARI, PT	Kelapa Sawit	HGU	0,15799641174	0,15141991827

10	SAJAU HILIR	PRIMA BAHAGIA PERMAI, PT	Kelapa Sawit	PBT	2851,50904466000	546,96816787300
11	SAJAU HILIR	PRIMA BAHAGIA PERMAI, PT	Kelapa Sawit	HGU	320,93894196000	302,58014372400
12	SAJAU HILIR	PRIMA BAHAGIA PERMAI, PT	Kelapa Sawit	HGU	4564,29446193000	3171,50963248000
13	SAJAU HILIR	PRIMA BAHAGIA PERMAI, PT	Kelapa Sawit	HGU	6295,33456037000	2459,66985360000

### C. Temuan-temuan Awal Studi

Beberapa temuan awal yang cukup penting dari studi ini dapat dibagi menjadi tiga hal utama besar: (1) Akar Krisis Sosial-Ekologis, (2) Pembelajaran dari Dua Desa (3) Benang Merah dan Inisiatif

Dua lokasi studi ini memiliki karakter sosial-ekonomi dan lanskap agro ekologi yang berbeda hal ini akan menentukan jenis krisis yang dihadapi, respon dan inistiaf yang juag berbeda satu dengan lainnya. Desa Long Beluah mewakili jenis Agroekologi sekitar Sungai dan Hutan. Dengans euruh kekuarangannya, desa ini masih memiliki perangkat dan kelembagaan adat yang masih cukup kuat dipegang dan praktikkan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak praktik adat dalam keseharian masyarakatnya. Tidak hanya dalam kehidupan sosial seperti; pernikahan, kelahiran dan kematian yang memakai adat. Namun juga dalam hal pengelolaan lahan dan hutan. Dalam upaya perlindungan alamnya, hamper semua masyarakat Dayak memiliki aturan adat yang sejenis dalam mengatur tata ruang wilayah seperti adat *Tajahan, Kaleka, Sapan Pahewan, dan Pukung Himba*. Sikap dan perilaku yang arif dan bertanggung jawab dalam praktek pengelolaan sumberdaya hutan tersebut, pada gilirannya melahirkan citra manusia Dayak yang bercirikan sosio-religius-magis. Jika kita telusuri, konsepsi konservasi tersebut adalah sebuah perlindungan flora dan fauna. Inilah yang juga banyak dianut oleh masyarakat dayak di Long Beluah.

Desa Long Beluah memiliki tantangan langsung dari perkebunan Sawit dan maraknya *illegal logging*. Agro ekologi masyarakat di Long Beluah yang banyak di pertanian sekitar hutan dan sekitar sungai, rusak sejak perusahaan sawit masuk memberi dampak negatif bukan hanya soal ekologis tapi juga konflik sosial sosial, menurunnya sumber ekonomi dan pudarnya budaya. Pada saat yang sama tercemarnya sumber air minum menjadi persoalan sendiri. Hadirnya perkebunan juga berdampak pada keanekaragaman hayati di lokasi tersebut, sebagai masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada alam, tercemarnya air berarti berkurangnya ketersediaan pangan yang selama ini disediakan oleh alam, khususnya sungai. Petani di sekitar desa Long Beluah sangat bergantung pada alam, mengingat sebagian besar merupakan padi tadah hujan, dengan panen setahun sekali, tercemarnya sumber air , berarti tercemarnya pangan pokok mereka.

Sedangkan Desa Ardi Mulyo mewakili desa dengan corak penduduk transmigran dengan agroekologi sawah dataran rendah. Para transmigran yang menjadi penduduk di deas ini adalah dari pulau Jawa (Jawa Timur dan Jawa Tengah). Rezim yang

ditantang dan hadapi adalah rezim pertambangan, juga ada perkebunan sawit, serta pembangunan infrastruktur (khususnya pembangunan pelabuhan).

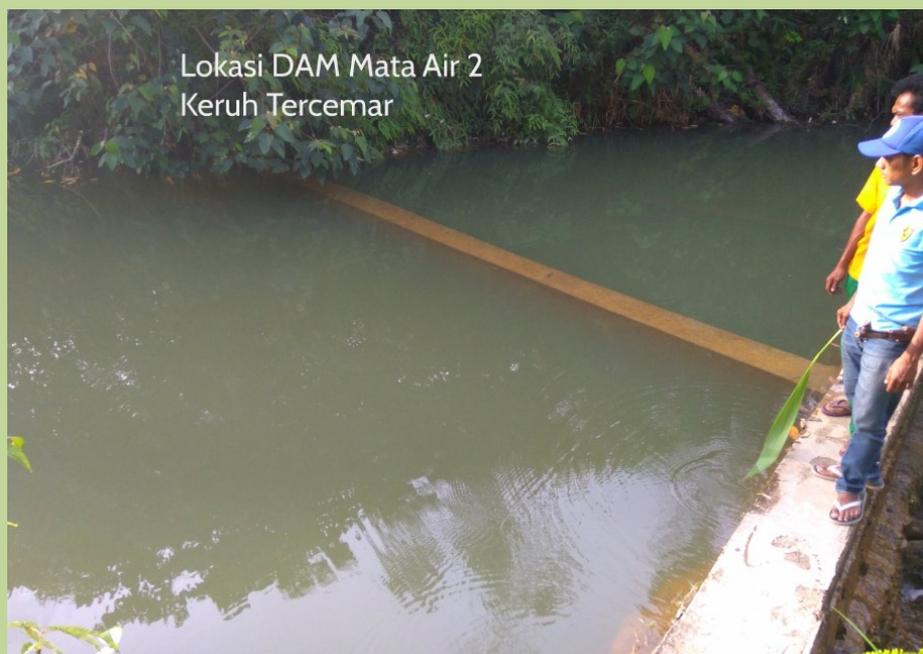
### (1) Akar Krisis Sosial-Ekologis

Persoalan krisis sosial-ekologis yang terjadi di dua desa lokasi setudi, bisa dilihat bagaimana perubahan ekosistem yang terjadi menggunakan indikator IPGs (International Public Goods).

**Pertama**, dari sisi Ketersediaan Air, hampir semua industri ekstraktif (Perkebunan dan Tambang) memiliki persoalan pencemaran pada ketersediaan air bersih, seperti yang terjadi pada Desa Long Beluah. Pada kasus lain pencemaran pertambangan juga mempengaruhi tambak-tambak ikan milik warga. Dalam kurun waktu 5-3 tahun terakhir puluhan mata air yang sebelumnya ada di hutand an kebun masyarakat desa Long Beluah, kini tinggal 3-4 mata air saja. Sulit memisahkan hilangnya mata air ini tidak dihubungkan dengan masuknya perkebunan sawit yang masif menebang hutan.



\*Lokasi Air Tercemar di Desa Long Beluah



**Kedua**, Keamanan Pangan dan Ketahanan terhadap perubahan iklim. Model-model pertanian alami (agroekologi), khususnya yang telah dilakukan berdasarkan nilai-nilai *local wisdom*. Dari temuan lapangan studi ini menunjukkan dalam jangka panjang bentuk-bentuk pengembangan pertanian berbasis agro ekonomi lokal lebih mampu bertahan dari perubahan iklim. Hal tersebut sangat dipengaruhi karena ketersediaan benih-benih lokal yang saat ini mulai menipis (bahkan sebagian telah hilang), dan pada sisi lain benih hibrida serta model pertanian yang dibawa oleh industri pertanian, terbukti tidak selalu mampu beradaptasi dengan jenis tanah dan iklim di kabupaten Bulungan. Salah satu penduduk di desa Long Beluah, mencoba mengembangkan ekonomi berbasis agro-ekologi lokal ini. Meski dapat dikatakan berhasil, namun hingga sekarang belum mampu diadopsi secara kolektif oleh warga desa. Bukan hanya soal pengetahuan dan ketrampilan budidaya, tapi model budidaya agroekologi ini membutuhkan ketekunan dan keuletan tersendiri, yang tidak semua masyarakat memiliki kemampuan itu. Namun, setidaknya masyarakat di Desa Long Beluah mulai menyadari dan mengakui bahwa ke depan pasca ketergantungan kebun dan hutan, pertanian agroekologi akan menjadi alternatif bagi sumber mata pencaharian di desa, sebab pengaruh dari perubahan iklim semakin nyata dirasakan.

**Ketiga**, Keseimbangan Biodiversitas, perubahan tata ruang yang cukup masif, diiringi dengan masuknya industri ekstraktif yang cukup besar sangat mempengaruhi perkembangan biodiversitas di masing-masing lokasi riset, hal paling nampak adalah perubahan populasi fauna, ketidak seimbangan biodiversitas ini tidak selalu ditandai dengan penurunan populasi hewan spesies tertentu (seperti burung Enggang/Kerangkong), hilangnya ekosistem tempat tinggal fauna juga menimbulkan persoalan di pertanian sehingga ada ancaman hama pada kawasan pertanian, seperti di desa Ardi Mulya dimana Beruk mengancam pertanian semangka karena kehilangan ekosistemnya, jika serangan terjadi maka dalam satu malam bisa menghabiskan 1 ha semangka. Pada kasus lain, di Desa Long Beluah, perkebunan sawit juga meningkatkan populasi babi hutan, karena ketersediaan makanan yang terlalu berlimpah dari limbah sawit, sehingga ancaman terhadap pertanian masyarakat juga meningkat. Pencemaran akibat dari pupuk sawit di pinggiran sepanjang sungai desa Long Beluah telah terbukti mencemari sungai dan mempengaruhi menyusutnya beragam ragam ikan lokal sungai yang dulu mudah didapatkan warga.

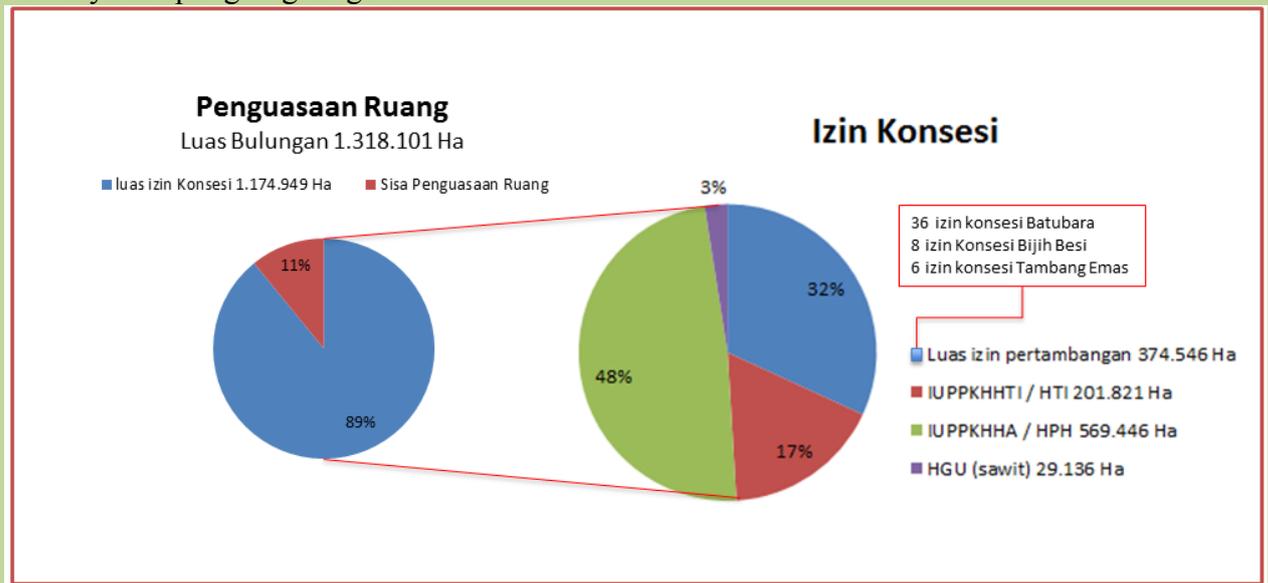
Sementara di wilayah hutan yang telah ditebang untuk perkebunan sawit, beragam pohon-pohon utama yang menjadi pengikat ekosistem hutan juga mulai hilang, seperti Pohon Madu. Pohon Madu bagi masyarakat Dayak di Desa Long Beluah dan sekitarnya bukan hanya aset ekonomi, namun ia juga merupakan pohon sakral untuk beragam ritual adat. Hilangnya Pohon Madu bukan hanya hilangnya aset ekonomi hutan, namun juga hilangnya tradisi, budaya, dan ritual adat. Yang menarik, setelah mendapat desakan keras dari masyarakat adat di Desa Long Beluah, pihak perusahaan sawit menyisakan beberapa pohon madu di wilayah tebangan hutan untuk penanaman sawit. Namun, yang tidak dipikirkan oleh pihak perusahaan sawit itu, Pohon Madu hanya bisa hidup dengan satu ekosistem hutan yang dibangun dalam satu sistem simbiosis mutualisme. Dibiarkannya satu Pohon Madu, namun hutan disekitarnya telah dibabat semuanya, adalah tindakan membiarkan Pohon Madu mati perlahan. Sebab hidupnya Pohon Madu juga tergantung masih ada tidaknya ekosistem hutan disekitarnya.

**Keempat**, Selain dari indikator IPGs, Krisis sosial ekologis pada wilayah Bulungan, sangat dipengaruhi oleh **keadilan-ruang**. Dalam beberapa tahun terakhir terlihat peningkatan izin konsesi korporasi, yang terlihat tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pada beberapa tahun terakhir, bencana ekologis banjir hampir selalu rutin terjadi di Bulungan.

**Kejadian Banjir 2015-2018**

- Tahun 2015 : terbesar, beberapa tempat mencapai 7 meter hingga bisa dilalui speed boat.
- Tahun 2016 : pada bulan Oktober Desa Metun Sajau terendam
- Tahun 2017 : 5 kecamatan di Bulungan, khususnya kecamatan yang dilintasi Sungai Kayan. Yakni, Peso, Peso Hilir, Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas dan Tanjung Selor.
- Tahun 2018 : Wilayah Bulungan terendam, Koordinator Lapangan BPBD Kalimantan Utara Asnawi mengatakan ancaman meninggi terus, kiriman air dari Sungai Kayan di bagian hulu masih sangat tinggi.

Luas Wilayah kabupaten Bulungan adalah 13.181,92 km<sup>2</sup> (atau 1.318.101 Ha) terdiri dari 10 Kecamatan, 81 Desa dan 6 Kelurahan. (\*Bulungan Dalam Angka 2016), Hasil Olah data walhi, jika dioverlay dengan izin konsesi yang bersinggungan hanya dengan 3 kecamatan dan 4 desa, setidaknya 89% luas wilayah Bulungan, Kalimantan Utara masuk dalam izin konsesi. Luasnya wilayah konsesi tentu melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.



Selain beban konsesi perkebunan dan tambang, izin konsesi kehutanan menduduki luasan paling besar mencapai 48% dari luas total izin konsesi. Pertanyaan mendasarnya, berapa banyak ruang yang tersisa untuk wilayah kelola rakyat.

## Izin Konsesi Kehutanan di Bulungan

\*Desa Long Beluah dan Desa Panca Agung

DESA	NAMA PERUSAHAAN	LUAS SK (HA)	LUAS YANG MASUK DESA (HA)
LONG BELUAH	PT. INHUTANI I UNIT PIMPING	45480,000000000000	1684,24481425000
LONG BELUAH	PT. INHUTANI I UNIT SAMBARATA	106020,000000000000	1309,15275634000
LONG BELUAH	PT. ITCI KAYAN HUTANI	218375,000000000000	8279,74653571000
PANCA AGUNG	PT. INTRACAWOOD MANUFACTURING	199571,000000000000	2987,15575487000

NAMA PERUSAHAAN	LUAS SK	DESA	LUAS MASUK DALAM DESA (HA)
PT. ADINDO HUTANI LESTARI	201821,000000000000	PANCA AGUNG	1337,38685633000

### (2) Pembelajaran dari Dua Desa; Dampak dan Inisiatif

Hasil studi awal di **Desa Long Beluah** memberi beberapa temuan khusus yang dapat menjadi pembelajaran dalam menyikapi beragam dampak negatif masuknya ekspansi perkebunan sawit yang telah masuk sejak 2010-2011. Khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki sistem adat yang cukup kuat ini. Termasuk munculnya respon, inisiatif dan batas-batasnya. Diantara temuan khusus tersebut adalah:

- a. **Janji Palsu atas nama Pinjam Pakai dan Plasma.** Salah satu faktor di awal yang menyebabkan sawit bisa masuk adalah, ada janji bahwa tanah yang akan digunakan untuk perkebunan sawit bentuknya pinjam pakai. Namun praktiknya pelepasan tanah sepenuhnya. Hal ini terjadi akibat pelepasan KBAK secara sepihak (80 % sekarang dikuasai Sawit berikut Hutannya). Melalui cara “pemetaan sosial” (mencari tokoh utama di desa), perkebunan sawit menjanjikan setiap orang nantinya akan mendapat 1 ha, tanpa harus bekerja namun setelah sawit masuk janji itu tak pernah terpenuhi. Termasuk janji Plasma-Inti dengan perbandingan: 80:20 dan panen pada tahun 2015, ternyata itu semua hanya isapan jempol semua. Kini, sesudah 7 tahun kurang lebih 240 warga telah melepaskan tanahnya baik karena terpaksa karena terkepung sawit ataupun karena tekanan lainnya. Harapannya semua yang melepaskan lahan dapat menjadi plasma sebagaimana dijanjikan sebelumnya. Namun hingga kini janji itu tetap tinggal janji.

*“...disini dulu banyak yang percaya dengan tawaran pinjam pakai (dari Perusahaan Sawit). Kami setuju, karena tanah masih milik kami, toh nanti akan kembali ke kami lagi. Apalagi ada janji plasma 80:20..maka awalnya banyak yang setuju. Tapi ternyata semua itu ternyata palsu...sekarang kami masih menuntut ...agar ganti rugi yang layak, dan juga dampak pencemaran air...agar kami disediakan air bersih...(Pak L, warga Desa Long Beluah)*

- b. **Sawit “Berlegitimasi Oknum Adat”.** Pada mula masuknya perkebunan sawit di desa Long Beluah selain didukung penuh oleh pemerintah desa, juga menumpang dan melibatkan anggota pengurus adat di Desa Long Beluah. Hal ini menjadi masalah dan dilema sendiri di internal masyarakat desa. Sebab, bukan hanya menimbulkan kekecewaan bagi sebagian masyarakat yang sejak awal menolak sawit karena ancaman perusakan lingkungan dan perampasan tanah adat, namun juga menimbulkan masalah lain berupa konflik sosial horizontal di kelembagaan adat sendiri. Sebab tidak semua pengurus adat di Desa Long Beluah mendukung masuknya sawit. Hingga kini setelah sawit telah masuk, konflik sosial ini masih terus terjadi, timbul tenggelam tanpa penyelesaian yang tuntas. Sawit telah menciptakan kondisi pecah belah di masyarakat adat. Pada gilirannya, kondisi ini menimbulkan bara dalam sekam dalam kehidupan sosial di Desa Long Beluah. Akibat terjauhnya, hingga sekarang semakin sulit membangun kepercayaan untuk melakukan gerakan perlawanan mengatasnamakan adat. Sebab sudah mulai ada stigma adat sebagai pendukung perkebunan sawit. Meskipun harus ditegaskan hal itu hanyalah perilaku sebagian “oknum” yang mengatasnamakan adat.

*“....yang paling sulit, bagaimana meyakinkan bahwa tidak semua tetua adat itu setuju dengan sawit...kita bingung, mau bilang terang-terangan, nanti kita bisa bermusuhan...saya tidak menghendaki itu...tapi saya juga tahu kalo, kalo sebagian dari tetua dat juga mendukung sawit...”* (Pak L, tokoh adat Long Beluah).

- c. **Sungai dan Hutan yang Tak Sama Lagi.** Ekspansi perkebunan sawit di Desa Long Beluah, sudah mulai terasa dampak negatifnya di masyarakat. Khususnya dalam soal pencemaran sungai Kayan yang menjadi salah satu sumber kehidupan di Desa Long Beluah. Sungai bukan hanya sumber ikan, tetapi juga media transportasi dan tempat bermain anak-anak. Kini sejak limbah pupuk sawit terbuang di pinggir sungai, mulai mengendap dan menimbulkan pencemaran. Selain bau yang mengganggu, banyak ikan-ikan lokal yang mulai hilang. Anak-anak di Long Beluah sekarang berfikir ulang untuk bermain dan berenang di sungai, sebab sudah banyak kejadian gatal-gatal dan penyakit kulit menjalar mereka yang mandi di sungai desa mereka. Penebangan hutan secara luas untuk penanaman sawit juga menjadi persoalan lingkungan lain yang multi dimensi. Bukan hanya soal hilangnya sumber ekonomi masyarakat dari hutan, berupa hewan buruan, madu, rotan, obat-obatan tradisional dan sumberdaya hutan lainnya, namun lebih dari itu hilangnya hutan juga berpengaruh pada lunturnya beragam tradisi dan budaya adat yang selama ini tergantung dengan keberadaan hutan. Seperti cerita hilangnya pohon madu yang dijelaskan sebelumnya. Sebab hutan bagi masyarakat adat Long Beluah bukan sekedar sumber ekonomi tetapi sebagai kesatuan ekosistem ruang hidup mereka. Lebih dari itu, yang dikhawatirkan dalam jangka panjang adalah ketika masyarakat adat sudah tergantung sepenuhnya dari sawit, dan menjadi buruh (pekerja lepas) karena tak punya tanah lagi. Bagaimana dengan generasi selanjutnya.

Krisis ekosistem Sungai dan Hutan mengancam kehidupan jangka panjang bagi generasi berikutnya di Long Beluah. Inilah yang menjadi sebab keluhan salah seorang pejuang adat dan lingkungan di Desa Long Beluah berujar;

*“Yah begitulah Mas, sejak Sawit masuk, sungai dan hutan sudah tak sama lagi seperti dulu (saat saya masih kecil)...kasian-anak-anak sekarang....tak bisa nikmati dan bermain sungai Kayan lagi...banyak yang kena gatal-gatal dan penyakit kulit itu...”*(Pak Yunus, warga Long Beluah)

- d. **Perlawanan Minus Solidaritas.** Usaha sebagian masyarakat di Desa Long Beluah untuk menolak kehadiran sawit sudah lama dilakukan. Namun karena pucuk pimpinan di pemerintahan desa maupun di elit struktur adat yang dominan mendukung sawit membuat perlawanan ini sulit mendapat solidaritas kolektif yang luas di desa. Bukan karena masyarakat desa menerima sawit, tapi mereka rata-rata takut dan segan dengan elit desa dan adat. Sebagian menagku ada teror yang dilakukan baik langsung maupun simbolik. Misalnya perlakuan pemerintah Desa Long Beluah yang mempersulit pengurusan administratif bagi para peniak sawit. Hal ini mungkin sederhana, namun efektif di tingkat desa. Beberapa tokoh di desa yang melakukan penolaka sawit akhirnya banyak membangun jaringan ke luar desa.

Setelah beberapa tahun melakukan perlawanan, kelompok penolak sawit di Desa Long Beluah yang dimotori Pak Y, Pak H, dll, akhirnya bertemu dengan jaringan WALHI dan kemudian berlanjut dengan AMAN di Tanjung Selor. Lambat laun setelah mendapatkan bimbingan dan dampingan kelompok ini semakin berani melakukan pengorganisasian dan konsolidasi ulang di desa. Tentu saja, bukan hal mudah. Sebab hingga kini mayoritas elit di desa baik Pemerintah Desa dan Adat masih mendukung sawit. Terlebih menurut keterangan kelompok penolak sawit di hampir semua desa di sepanjang Sungai Kayan sudah “terbeli” dan menjadi pendukung sawit. Artinya, meski perlawanan di Desa Long Beluah terbelah dan masih sepi solidaritas, namun minimal “ada suara perlawanan” yang muncul. Inilah tantangan berat yang mesti jadi pembelajaran dan agenda advokasi lebih lanjut.

*“...hampir semua desa dipanjang Sungai Kayan, dari Tanjung Selor kesini (Desa Long Beluah)... yang terkena sawit, sudah banyak “terbeli”, baik tokoh desa dan adatnya...ndak heran jika mereka mendukung sawit. Jadi, mungkin kita masih kecil (perlawanan) di Long Beluah ini...namun kita tetap akan melawan...kami berharap WALHI dan AMAN bisa membantu menguatkan kami disini...”*(Pak Y, Warga Long Beluah)

- e. **Menyehatkan Kembali Pranata Adat.** Meski sebagian “oknum” elit adat di Desa Long Beluah telah terlibat mendukung ekspansi sawit, namun bukan berarti pranata adat ikut luruh. Beberapa elit adat lain mengistilahkan kondisi adat mereka “sedang sakit”.

*“.....adat kami lagi sakit mas. Kalo sehat harusnya ngerti sawit itu merusak adat...sebab adat kita sejak nenk moyang kita dulu...menghormati dan begantung juga pada hutan..jika hutan rusak..pasti adat kami juga akan rusak...”* (Pak L, Anak Tokoh Adat, Desa Long Beluah)

Maka, jika usaha gerakan untuk menolak ekspansi sawit mau lebih kuat, agenda utamanya adalah perlu “menyembuhkan” pranata dan nilai adat yang sedang sakit itu. Masyarakat adat Long Beluah masih percaya bahwa nilai adat mereka masih lebih dipatuhi secara sosial daripada hukum formal negara. Hanya masalahnya siapa yang akan memimpin penyehatan sakit ini ketika para pimpinan adat masih belum menyadari bahwa kondisi adatnya sedang sakit?. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meyakinkan beberapa tokoh adat yang belum “tekontamiansi” oleh bujuk rayu sawit agar berani “menyelamatkan” adat yang selama ini hanya menjadi “legitimasi” segelir orang demi mencari keuntungan ekonomi sesaat. Padahal jika nilai dan pranata adat rusak, bukan hanya mereka yang hidup sekarang yang rugi, tapi juga pada anak cucu nanti. “Gerilya” semacam inilah yang sementara mampu dilakukan, sembari menunggu perubahan momentum politik di desa dan kabupaten yang lebih berpihak kepada mereka. Salah satunya adalah pengakuan Masyarakat Adat Long Beluah yang sedang di usulkan oleh beberapa pendamping; AMAN dan Walhi.

- f. **Merindukan Pemimpin Tahan Banting.** Meski usaha dan inisiatif untuk memperbaiki dan memulihkan ekosistem dan ruang hidup di Desa Long Beluah yang rusak akibat ekspansi sawit belum kokoh, namun sebenarnya di antara masyarakat sudah mulai tumbuh kesadaran bahwa dalam jangka panjang sawit tidak akan menguntungkan bagi masyarakat desa. Sebab makin hari mereka sadar, bahwa sumber utama mata pencaharian mereka berupa tanah, makin hari makin habis. Baik terpaksa dijual maupun karna keinginan pragmatis dapat uang besar. Sebagai masyarakat desa yang masih agraris bergantung pada dunia pertanian dan ekonomi berbasis tanah, mereka sadar tanpa kedaulatan atas tanah mereka lambat laun akan tersingkir dan miskin. Namun demikian, yang paling sulit hingga sekarang adalah siapa yang akan memimpin gerakan perjuangan ini? Pengalaman perjuangan yang dilakukan selama ini di Desa Long Beluah, masalah utamanya adalah bagaimana pemimpin gerakan yang mampu konsisten dan tahan banting? Sebab yang dilawan adalah koorporasi yang memiliki uang besar. Pengalaman yang sudah terjadi, beberapa pemimpin yang sebelumnya kritis menolak sawit, tiba-tiba “belok arah” dan bungkam, setelah didatangi oleh perusahaan. Mungkin bukan saja tahan banting soal uang, tapi juga tahan banting dari “tekanan”, teror dan ancaman-ancaman lainnya yang juga kerap hadir.

*“...berat mas... Ini soal uang besar...sudah beberapa kali, kelompok kita gembos...karena beberapa teman kita yang tadinya memimpin..pamit mengundurkan diri (ada juga yang diem-diem). Kita sih tahu-sama tahu...kenapa bisa begitu...tapi mau gimana lagi? Apalagi kalao udah ada teror...dan ancaman, tidak semua tahan banting mas...tapi inilah bagian dari perjuangan itu...(Pak Y, tokoh warga penolak sawit, Desa Long Beluah).*

- g. **Inisiatif Agroekologi Lokal dan Batasnya.** Di tengah beragam krisis yang utamanya dipengaruhi oleh masuknya ekspansi sawit, seorang petani asli Jawa dan sudah lama menetap di desa Long Beluah, bernama Pak Marno menunjukkan harapan lain. Ia mengembangkan pertanian agroekologi yang cukup berhasil. Selain pengembangan tanaman pertanian, ia juga menekuni budidaya sayur mayur dan palawija. Sebenarnya ilmu utama Pak Marno

adalah pengetahuan umum petani di Jawa yang memanfaatkan sawah dan pekarangan mereka dengan cara “tumpang sari”. Prinsipnya, mengkombinasikan beberapa jenis budidaya tanaman dalam satu lokasi sehingga menghasilkan keuntungan yang bertingkat (ada harian, mingguan, bulanan dan tahunan). Sistem agroekosistem tumpang sari ini sebenarnya di Jawa adalah “siasat” bagi petani berlahan sempit. Dengan cara ini, para petani lahan sempit (gurem) berusaha memenuhi kebutuhan subsistensi mereka, syukur-syukur jika ada penghasilan lebih sehingga bisa dijual secara komersil. Pak Marno juga demikian, awalnya usaha budidayanya untuk kepentingan subsistensi, namun karena mulai berkembang dan menghasilkan maka diteruskan untuk dicoba buat kepentingan komersil. Meski belum sepenuhnya untuk kebutuhan komersil. Namun demikian, Inisiatif lokal Pak Marno ini masih sendirian. Belum mampu menjadi kesadaran kolektif di masyarakat desa Long Beluah. Hal ini setidaknya karena tiga sebab: (1) pengetahuan, kemampuan dan ketampilan yang dimiliki masyarakat, termasuk ketekunan dan kesabaran. (2) komoditi tanaman masih dianggap belum menghasilkan uang cepat dan besar, (3) pasar lokal yang belum terbuka bagi komoditas palawija dan sayur mayur. Meski kebutuhan harian ini tetaplah wajib.

*“Model pertanian Pak Marno sebenarnya itu udah bagus...tapi kita orang Dayak disini belum terbiasa cara kayak gitu...mungkin ini soal kebiasaan dan budaya saja...kalo sudah ada bukti keberhasilan biasa orang Long Beluah itu akan meniru...”* (Pak Hellis, warga Desa Long Beluah)

Sementara itu dari studi awal di **Desa Ardi Mulyo** sebagai desa transmigrasi yang mendapatkan beragam dampak dari pertambangan dan pembangunan infrastruktur (pelabuhan dan jalan raya) lainnya, ditemukan beberapa temuan khusus yang dapat menjadi pembelajaran. Termasuk di dalamnya proses munculnya respon dan inisiatif lokal untuk keluar dari krisis sosial-ekologis. Beberapa temuan khusus tersebut adalah:

- a. **Demi Prestise Sosial, Atas Nama Krisis Identitas.** Pegaruh utama yang dirasakan masyarakat sejak masuknya pertambangan di wilayah Desa Ardi Mulyo adalah pengaruh kultural. Masyarakat di desa yang sebelumnya hidup sederhana bersumber dari pertanian dan tambak merasa tidak percaya diri dengan identitas lamanya sebagai petani dan petambak. Keberadaan tambang seolah dianggap mendongkrak “identitas sosial” mereka. Menjadi pegawai dan buruh (papaun statusnya) di industri tambang dianggap lebih memiliki prestise dan gengsi sosial lebih baik dibandingkan menjadi petani dan petambak. Secara riil penghasilan ekonomi yang diterima tidak terlalu jauh berbeda. Namun bisa jadi, hal ini terjadi karena para pegawai tambang setiap hari memakai seragam dan masuk pabrik harian. Sehingga mereka “nampak” rapi dan bersih setiap hari. Sementara kegiatan di sawah dan tambak identik dengan kotor dan lusuh. Akibatnya, sebagian masyarakat meninggalkan sawah dan tambak mereka semata ingin berebut menjadi buruh di pertambangan. Kini, semakin hari mudah disaksikan banyak masyarakat di Desa Ardi Mulyo mengalami krisis identitasnya sendiri. Prinsipnya, yang penting “nggaya” meski aslinya kere.

- b. **Basis Subsistensi yang Tercemar.** Selain bersumber pada mata pencaharian berbasis pertanian, masyarakat di Desa Argo Mulyo banyak mengandalkan tambak sebagai sumber ekonomi hariannya. Tambak-tambak warga yang bergantung pada kejernihan mata air dan air sungai sebagai syarat sehat tidaknya ikan-ikan mereka dalam kurun waktu 3-2 tahun terakhir harus menerima kenyataan tercemarnya sumber air tambak mereka. Tidak perlu riset mendalam untuk mendapatkan kesimpulan semacam ini. Jelas pertambangan batubara yang ada di sekitar Desa Argo Mulyo telah menyebabkan perburukan kualitas air dan pencemaran langsung dan tidak langsung atas sumber air dan sungai-sungai di sekitarnya. Jika hal ini tidak segera di atasi, bukan tidak mungkin dalam jangka panjang akan mencemarkan dan mengancam tambak-tambak dan pertanian masyarakat secara lebih luas. Inilah salah satu hal yang menjadi keresahan dan sumber protes warga atas tambang di Desa Ardi Mulyo hingga sekarang. Sebab hasil pertanian di Ardi Mulyo masih terbukti mampu diandalkan menjadi alternatif atas tambang.

*“...terus terang, sebelumnya saya pernah kerja di tambang. Ikut-ikutan yang lain..Tapi saya pikir-pikir ulang ternyata jatidiri saya adalah petani..jadi saya memilih kembali ke pertanian...syukurah, sekarang hasil dari tanaman semangka saya cukuplah..., ya kalo dibanding hasil kerja tambang...lebih baik sekarang lah...  
(Pak Ali, petani Ardi Mulyo, mantan buruh tambang)*

- c. **Potensi Gagal Panen Meningkat.** Sejak pertambangan menggunduli hutan beserta infrastruktur pendukungnya termasuk jalan raya, mempengaruhi kehidupan ekosistem hewan-hewan di yang hidup dari hutan. Sejak beberapa tahun tahun terakhir hama binatang babi dan beruk sering turun ke sawah dan kebun warga dalam jumlah besar. Bukan hanya demimakanan tapi juga merusak tanaman dan sawah warga. Dugaan warga karena sumber makanan mereka di hutan telah berkurang atau bisa jadi telah hilang seiring hutan yang paling gundul. Akibatnya, berkali-kali tannaman warga yang sudah menjelang panen gagal akibat serbuan hama babi, maupun beruk yang sulit untuk diantisipasi. Apa yang dilakukan warga hanya bisa menghalangi atau memburunya. Namun karena babi dan beruk ini kawanan hewan berkelompok dan dalam jumlah besar, strategi menghalangi dan mengusirnya belum efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan bukan hanya soal sumber ekonomi dari hutan hilang namun juga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan berakibat pada hal yang lebih luas, yakni rusak dan gagalnya panen warga desa yang menjadi simpul ketahanan pangan masyarakat secara reguler.
- d. **Meruncingnya Segregasi Sosial.** Salah satu dampak sosial industri ekstraktif tambang di Desa Ardi Mulyo adalah semakin meningkatnya segregasi sosial masyarakat. Awalnya segregasi sosial itu akibat dari ketegangan pro dan kontra atas tambang, berikut dampak-dampak multi dimensinya (sosial, ekonomi dan ekologi). Namun kini, segregasi sosial semakin meruncing justru berbasis asal-usul daerah. Sebagaimana diuraikan di profile desa, Ardi Mulyo sebagai desa transmigran dihuni oleh beragam suku, etnis dan agama yang berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Namun mayoritas awalnya adalah dari kepulauan Jawa (Jawa Timur dan Jawa Timur) dan NTB. Dalam beberapa tahun terakhir segregasi sosial mulai meruncing berbasis kota asal masing-masing. Salah satunya disebabkan oleh perebutan sumberdaya lokal yang ada di desa Ardi Mulyo yang semakin menyempit. Baik di pertanian, tambak, dan wiayah off/non farm lainnya. Hadirnya

pertambangan semakin hari mengancam ekonomi pertanian desa sebagai simpul utama mata pencaharian warga desa. Baik karena dampak pencemaran air maupun kerusakan ekologis lainnya. Masyarakat semakin pragmatis dan sempit pilihan hidup. Dalam jangka panjang dikuatirkan perebutan sumberdaya ini akan menjadi konflik yang lebih besar. Segregasi sosial ini tidak akan meruncing jika masing-masing warga memiliki jaminan hidup yang cukup, khususnya tanah. Hilangnya tanah adalah penanda awal hilangnya sumber penghasilan di desa Ardi Mulyo, namun selama masih memiliki tanah maka masih ada jaminan untuk hidup sejahtera.

*“Saya transmigran dari Bugis, termasuk awal disini...dulu saya kerja sebagai “motoris” (sopir/pemilik kapal). Yah..kan dulu semua harus lewat sungai...kita yang atur semua. Nah, waktu itu banyak transmigran pulang kampung, ndak krasan katanya. Saya banyak beli tanah mereka, yang pulang pulang itu..harganya masih murah, karena ditinggal. Alhamdulillah..gara-gara tabungan tanah itu..sekarang kita ndak bingung buat hidup..”* (Pak Muhlis, transmigran awal dari Bugis di Ardi Mulyo)

- e. **Inisiatif Kelola Lahan Warisan Jawa vs Pengetahuan lokal (Gilir Balik).** Bagaimanapun masyarakat Ardi Mulyo masih berharap pada dunia pertanian selain tambang. Tantangannya adalah delima sistem kelola lahan pertanian. Di satu sisi sebagian masyarakat lokal masih menggunakan sistem kelola gilir balik, namun di sisi lain para transmigran sudah menggunakan sistem kelola lahan ala pertanian Jawa. Meski awalnya terjadi “benturan” kecil, namun akhirnya terbukti bahwa sistem pertanian ala Jawa lebih berhasil, lebih efektif dan menghasilkan secara ekonomis. Akhirnya sistem kelola pertanian ala Jawa kini lebih dominan dibandingkan sistem gilir balik. Inisiatif ini tentu saja menjadi satu pembelajaran bagi desa-desa sekitarnya. Sebab perubahan sistem pertanian ini bukan hanya menjadi alternatif peningkatan ekonomi warga desa berbasis pertanian pangan, tetapi juga sebagai alternatif dari godaan melepaskan tanah demi industri ekstraktif pertambangan. Tantangannya adalah soal ketrampilan dan pengetahuan serta distribusi hasil pertanian berikut *food chain* nya yang lebih adil.

*“...jadi transmigran disini sulit mas. Mesti sabar. Biasanya orang desa itu butuh bukti, kalo sudah ada bukti, biasanya baru yang lain mau ikutan...itu yang saya buktikan dengan tetap bertani dan beternak sapi...dan sampai sekarang saya masih bisa hidup kan...?”* (Pak Taslim, Petani Ardi Mulyo, generasi awal transmigrasi yang bertahan hingga saat ini)

- f. **Bertahan dalam agroekologi.** Meski tambang dan sawit mengepung di sekitar Desa Ardi Mulyo, bukan berarti semua petani tunduk kalah dan meninggalkan sunia pertanian. Masih ada beberapa petani yang bertahan bertani, bahkan mengembagkan pertanian mereka ke arah pertanian organik. Hal ini jelas melawan keumuman yang dilakukan warga di Desa Ardi Mulyo yang masih tergantung pupuk kimia. Beberapa orang ini melawan arus dan membuktikan bahwa dunia pertanian tak kalah menghasilkan dibanding tambang dan sawit jika ditekuni dan diseriusin. Kini produk pertanian organik sudah mulai membuka peluang pasar, khususnya di luar desa Ardi Mulyo. Bukti semacam ini menjadi inspirasi bagi yang lain. Tentu saja inisiatif untuk bertahan ini punya tantangan besar khususnya

bagaimana bisa membangun kesadaran dan mengubah ketergantungan warga desa kepada tambang dan sawit yang dalam jangka panjang merugikan petani dan tanahnya.

*“...awalnya saya petani biasa pada umumnya disini mas..tapi kok saya prihatin, pupuk kimia itu kan merusak tanah dan mengancam kesehatan...tapi kenapa kok dipakai terus? Makanya saya coba-coba kembangkan pertanian organik..ternyata ndak kalah dengan yang pake pupuk kimia itu kok...ini juga mau saya buktikan bahwa bertani itu ndak kalah untung dibanding dengan buruh sawit aau tambang....mudah-mudahan bisa nular ke yang lain mas..”* (Pak Salim, Petani Organik Sukses di Desa Ardy Mulyo)

- g. **Yang Muda, Yang Menyela.** Salah satu temuan penting di desa Ardi Mulyo adalah peran pemuda yang cukup menonjol dalam dimensi kehidupan desa. Bukan hanya semangat dalam mengabdikan kembali ke desa menjadi perangkat desa, tapi juga upaya membuat terobosan peningkatan ekonomi lokal berbasis pertanian lainnya. Di sisi lain generasi muda ini juga berupaya membuka kesadaran masyarakat melalui teknologi baru. Beragam pengetahuan dan inovasi kelola pertanian di desa Ardy Mulyo didorong oleh keterbukaan informasi yang dibawa oleh generasi muda. Di tengah kejumudan model ekonomi tradisional desa, generasi muda “menyela” dengan membuka informasi, baik soal harga info harga dan trend pangan dan produk pertanian, pengembangan teknologi tepat guna, maupun rencana pengembangan inovasi pertanian lainnya. Setidaknya semangat para generasi muda ini mampu mendorong perubahan dan harapan baru agar generasi selanjutnya tidak tergantung semata pada ekonomi berbasis industri tambang maupun perkebunan sawit. Harapan ini semakin kuat sebab sudah mulai muncul anak muda yang lumayan stabil ekonominya dengan jalan-jalan alternatif ekonomi di luar tambang dan sawit. Bahkan menawarkan bentuk pertanian baru dengan prinsip-prinsip organik. Satu alternatif pertanian masa depan demi menjaga kesehatan tanah dan ekologis sekitarnya.

*“Awalannya setelah lulus S1, saya pengen kerja yang mapan...entah kemana yang penting keluar dari desa ini...tapi saya kok terpenggil untuk ikut membangun desa sendiri...makanya saya mau ketika ada peluang untuk menjadi staff di pemerintahan desa Ardi Mulyo...”* (Yosran, staff pemerintah Desa Ardy Mulyo).

*“Meski saya dari Panca Agung, saya banyak gaungnya dengan masyarakat di Desa Ardy Mulyo sini mas...saya juga belajar bertani disini. Sekarang saya lagi ngembangin budidaya organik...masih belajar mas...tapi cukup menjanjikan hasilnya..memang masalah utamanya biasanya soal bahan baku pupuk kandang. Saya pernah datangkan 1 truk pupuk Kandang dari Tarakan..agar bisa mencukupi kebutuhan disini...maklum masih semangat-semangatnya mas...”* (Budi Santoso, pemuda desa Panca Agung, belajar bertani di Desa Ardi Mulyo)

### (3) Benang Merah Masalah dan Inisiatif Lokal

Benang merah dari akar masalah di kedua desa adalah, masuknya ekspansi rezim *land grabbing* yang abai atas hak masarakat lokal berikut ruang hidupnya. Sistem pengetahuan lokal, ekonomi lokal, sumberdaya hutan dan ragam agroekologi lainnya tidak didudukkan secara serius sebagai satu potensi kehidupan masyarakat yang harus dihormati dan lestarikan. Sebaliknya, atas nama pengembangan ekonomi berbasis perkebunan sawit dan tambang membolehkan perusakan dan menggusur serta eksklusifitas atas masyarakat lokalnya.

Di Desa Long Beluah, yang banyak bertumpu pada ekosistem sungai dan sumberdaya hutan mengalami beragam dampak pencemaran dari pengembangan kebun sawit. Baik berupa hilangnya sumber mata air, pencemaran air bersih, pencemaran ekosistem sungai, hutan dan terutama konflik sosial yang bersifat vertikal dan horizontal. Sementara itu di Desa Ardi Mulyo, dampak dari perkebunan sawit dan pertambangan selain soal semakin menurunnya kualitas pertanian (potensi gagal panen yang berulang) dan juga basis subsistensi lainnya dari tambak ikan akibat pencemaran, dan hilangnya agroekologi lokal, masyarakat desa juga mengalami perubahan signifikan dalam pola budaya kerja (krisis identitas). Dari yang sebelumnya mandiri dengan sawah dan agroekologi lokalnya, berubah cepat menjadi semakin pragmatis dan instan. Misalnya menjadi pegawai rendahan di pelabuhan dan tambang, atau buruh kasar. Dampak lanjutannya adalah sikap ketidakpedulian atas beragam krisis sosial ekologis dan menimpa kesuburan sawah, pertanian, dan sumberdaya alam di sekitar mereka. Meski tidak sekeras di Desa Long Beluah, masyarakat di Desa Ardy Mulyo juga sudah muncul konflik sosial yang bersifat laten sejak perkebunan sawit dan Tambang masuk di sekitar desa mereka.

Selain itu masuknya perkebunan sawit dan pertambangan di Bulungan, telah menciptakan peningkatan bencana alam, khususnya banjir. Merujuk data kebencanaan (BNPB 2018) dalam kurun delapan tahun terakhir, yakni 2010-2018 terjadi peningkatan bencana banjir di Bulungan termasuk desa-desa disekitarnya. Hal ini menjadi indikator paling mudah, bahwa kebencanaan (banjir) tidak bisa hanya dianalisa sebagai fenomena alam. Sebab sebelum masuknya perkebunan sawit dan pertambangan batu bara di Bulungan frekuensi banjir tidak sesering sesudahnya.

Beragam masalah dan dampak yang hadir akibat ekspansi rezim *land grabbing* dan industri ekstraktif tambang tersebut, direspon, disikapi dan menumbuhkan inisiatif perlawanan secara berbeda. Hal ini sangat ditentukan oleh tiga faktor: (1) kekuatan dan jenis kepemimpinan, (2) kolektifitas sosial dan (3) kemampuan membuka peluang jaringan dan politik.

**(1) Kekuatan dan Jenis Kepemimpinan.** Masyarakat di Desa Long Beluh, memiliki beberapa tokoh yang dihormati, militan dan masih idealis. Sehingga mampu memobilisasi masyarakat lainnya untuk melakukan perlawanan masif dan terus menerus atas perkebunan sawit. Meski sebagian tokoh yang lain menjadi pendukung sawit. Argumen mereka berubah-ubah dari soal hak dan akses atas sumber agraria, adat hingga soal kerusakan ekologis (terutama air). Meski tantangannya hadir justru di kalangan sekelompok masyarakat lainnya yang telah tunduk dan “terbeli” pihak perkebunan sawit. Namun, keberadaan beberapa tokoh yang memimpin ini membuka peluang jaringan yang lebih besar dan memiliki tekanan politik yang cukup

diperhitungkan oleh pihak Perkebunan Sawit. Sebab “gerilya” politik kelompok ini juga sampai ke Pemerintah Daerah (melalui dorongan Perda Adat), hingga jaringan CSO lingkungan di tingkat pusat (salah satunya melalui WALHI –Wahana Lingkungan Hidup Indonesia- dan AMAN- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Sementara di Desa Ardi Mulya, inisiatif dan respon justru muncul dari kelompok anak-anak muda yang gelisah (krisis identitas) karena semakin hilangnya pengetahuan lokal pertanian mereka, munculnya ketergantungan ekonomi atas sawit dan tambang, serta merebaknya budaya acuh atas kerusakan sumberdaya alam, khususnya pertanian, tambak ikan dan agroekologi lokal yang sebelumnya telah terbukti menjadi sumber ekonomi utama masyarakat desa mereka. Ketiadaan kepemimpinan yang kuat membuat perlawanan yang muncul juga tidak terlalu sistematis. Argumen utama perlawanan lebih ke soal pentingnya mengembalikan kemandirian ekonomi berbasis ekonomi pertanian dan agroekologi lokal.

## **(2) Kolektifitas dan Segregasi Sosial**

Hal ini merupakan sumber energi perlawanan dan inisiatif terkait dengan kemampuan untuk merespon masalah dan tantangan yang hadir. Kedua desa dalam studi ini memiliki jenis kolektifitas yang hampir sama, yakni masih belum menemukan sumber kolektifitas sosial yang kokoh. Namun dengan faktor yang berbeda. Sebagai desa berbasis transmigrasi dari beragam daerah di Pulau Jawa, masyarakat Desa Ardi Mulyo tersegregasi secara sosial berdasarkan asal desa dan kotanya di Jawa. Misalnya blok masyarakat dari Kabupaten Jember, Lumajang, Surabaya, dll. Hal ini bisa terjadi karena dua hal: Pertama, belum adanya ruang temu bersama secara sosial-ekonomi dan politik di tempat lokasi baru. Kedua, adanya kontestasi yang cukup keras akibat dari sumberdaya yang terbatas di lokasi desa yang sama. Sementara di Desa Long Beluah, segregasi sosial di masyarakat terbentuk akibat dari perbedaan posisi, sikap dan cara pandang atas kehadiran perkebunan sawit. Termasuk di dalamnya konflik antara komunitas yang berbasis adat. Sebab sikap kelembagaan adat juga terbelah antara setuju dan menolak atas masuknya perkebunan sawit.

## **(3) Kemampuan Membuka Peluang Jaringan dan Politik**

Meski relatif lambat, kelompok anak-anak muda desa Ardimulya yang gelisah ini mulai membangun jaringan dan aliansi dengan kelompok aktivis lingkungan dan organisasi masyarakat sipil lainnya di tingkat daerah (khususnya Walhi) dan mengembang ke jaringan di tingkat provinsi dan Nasional, meski tidak sekokoh masyarakat di Desa Long Beluah. Beberapa tokoh desa Long Beluah yang menolak sawit karena merasa di desa sulit membangun ajrangan, maka berusaha membangun jaringan di luar desa. Setelah bertemu dengan WALHI dan AMAN kelompok di Long Beluah meningkatkan gerakan mereka dari menolak tambang berdasarkan argumen ekologis kemudian ke arah pengakuan atas kelembagaan dan tanah adat. Usaha pengakuan masyarakat adat di long Beluah adalah peluang lebih luas bagi gerakan di desa Long Beluah berkait dengan gerakan adat yang lebih besar di tingkat nasional dan global.

## Rekomendasi

Dengan dasar temuan, pertimbangan dan penjelasan di atas studi ini ingin mendorong beberapa rekomendasi: (1) koreksi kebijakan perijinan konsesi pertambangan dan perkebunan sawit (serta penguasaan tanah skala luas lainnya) yang jelas merusak dan mengabaikan prinsip keadilan-keberlanjutan ekologis. (2) Pentingnya mengarusutamakan mengembangkan kebijakan dengan watak pembangunan yang peka kekayaan biodeversity untuk keseimbangan ekosistem; Sosial, ekonomi dan ekologi yang beragam di masyarakat lokal/adat. Sehingga penting evaluasi kebijakan negara (pusat dan daerah) yang berwatak penyeragaman atas khazanah lokal. (2) pentingnya perlindungan sumber kehidupan dan keselamatan dasar rakyat. Khususnya tanah, air, sumber energi, pangan lokal. Dan memasukkan perlindungan itu ke dalam aturan dan kebijakan pusat dan daerah, (3) Penguatan dan advokasi kebijakan pembangunan pedesaan yang peka dan mampu mengintegrasikan dengan sistem nilai lokal yang selaras dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan ekologis. Dengan memastikan agenda ini masuk dalam Musdes dan mandat UU Desa, (4) Mendorong Inovasi kebijakan perencanaan dan pembangunan wilayah berbasis kawasan dan ekosistem lokal. Dengan jalan advokasi politik tata ruang di daerah (kabupaten dan provinsi), (5) Pentingnya pengembangan base praktis ekonomi rakyat (lokal/adat) sebagai alternatif ekonomi berbasis rezim ekstraktif SDA berikut strategi promosi yang selarasa dengan era milenial (6) Pentingnya pengembangan pengetahuan, ketarmpilan dan kemampuan generasai muda di desa tentang raga alternatif ekonomi baik berbasis pertanian maupun off/on farm agar tetap menjadi penerus dan penjaga ekonomi-ekolog pedesaan. (7) Pentingnya prioritas pengembangan advokasi dan pengorganisasian rakyat di wilayah-wilayah terpencil dan cenderung terisolasi, namun mendapat ancaman perusakan ekosistem yang masif baik dari ekspansi land grabbing maupun industri ekstraktif lainnya.

## Catatan Refleksi

Dengan pemebahsan dan penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang dapat menjadi refleksi ebih lanjut dalam gerakan sosial dan advokasi kebijakan yang lebih adil dan ekologis.

- (1) Kebijakan politik SDA yang dominan sekarang masih berwatak *polical of ignorance* (politik pengabaian) terhadap masyarakat lokal/adat berikut pengetahuan lokal dan hak-hak dasarnya. Akibatnya, masyarakat lokal/adat masih dianggap objek, bukan subjek bagi perubahan sosial-ekonomi pedesaan. Diperlukan pengakuan yang utuh bagi masyarakat lokal/adat bukan hanya pada level eksistensi dan kelembagaan saja tetapi juga wilayah (teritori) dan seluruh potensi lokalnya sebagai sumber perubahan menurut mereka masyarakat sendiri, bukan sebaliknya.
- (2) Ekpansi industri ekstraktif dan kooperasi skala luas (*land grabbing*) membawa budaya “ekonomi uang” yang pelan tapi pasti menciptakan budaya pasar (*market culture*) di pedesaan dan masyarakat adat. Prinsipnya hubungan manusia dengan tanah disederhanakan hanya berupa hubungan ekonomistik. Dan segala sumberdaya alam dapat didudukkan sebagai komoditi pasar. Akibatnya, hal ini menggerus habis kekuatan nilai, pengetahuan dan sistem kearifan lokal yang prinsipnya lebih holistik dan ekosistemik. Diperlukan satu perubahan paradigmatik pembangunan dari bentuk developmentalistik yang

- ekstraktif dan pro pasar menjadi pembangunan yang lebih eko-populistik, *pro poor policy* dan berkeadilan sosial-ekologis.
- (3) Bagaimanapun dalam jangka panjang kelanjutan perubahan dan perbaikan apapun ada dipundak kaum muda. Namun masih sedikit kebijakan dan program yang serius memprioritaskan kaum muda. Maka, penting kedepan memastikan semua kebijakan dan program dalam pemulihan ekosistem melibatkan dan memberi ruang yang cukup bagi kaum muda dan gagasannya.
  - (4) Problem utama dalam kerusakan dan krisis ekosistem salah satunya bersimpul pada soal "*Legal non Legitimed*". Dalam hal prosedur legal semua kooperasi besar memnuhi syaratnya. Namun minus "legitimasi" suara rakyat. Sehingga semua rekomendasi perbaikan kebijakan jangan sampai berhenti menambah "proedur dan instrumen baru, sebab akan mampu dibeli dan menambah legitimasi baru. Artinya, tak cukup gerakan pengakuan legal, tetapi penting juga penguatan keadilan (*legitimed* menurut rakyat). Karena itu dalam praktiknya harus dipastikan bahwa : "*right mush connected with justice*". Perda Adat penting, namun memastikan Perda Adat itu berkeadilan sosial dan ekologis bagi seluruh lapisan sosial di masyarakat adat juga tak kalah penting.
  - (5) Di tengah potret krisis sosial dan ekosistem yang hampir menyeluruh di kepulauan nusantara, sepertinya rasa pesimisisme lebih kuat dibandingkn optimisme. Dalam kondisi semacam itu penting mempromosikan dengan kuat "kabar baik dan *succes story*" (berbasis bukti empirik) dari masyarakat lokal/adat yang mampu menunjukkan inisiatif dan alternatif untuk kemandirian dan kedaulatan atas ruang hidup mereka, sesederhana apapun bentuknya. Sebab kadang diperlukan inspirasi dan keteladan sebelum menjadi kesadaran kolektif untuk mengubah.

*"Rakyat miskin pedesaan jika mampu menyadarkan diri untuk bangkit bergerak, itulah awal dari pembangunan (yang sebenarnya...)"* (Sajogyo, Lorejo, 2005)